

344.046  
MUS

P 2.1



**PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
DALAM KASUS LINGKUNGAN HIDUP  
DI PENGADILAN NEGERI**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**DESSY ANDREA MUSLIM**

**Nim.B.082-95.0151**

**PEMBIMBING**

**Prof.H.Purwahid Patrik, SH**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2000**

**PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
DALAM KASUS LINGKUNGAN HIDUP  
DI PENGADILAN NEGERI**

Disusun Oleh :

**DESSY ANDREA MUSLIM**

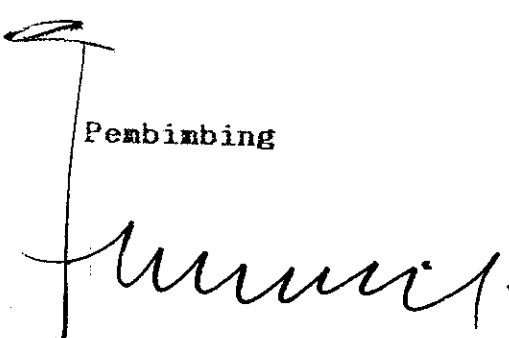
Nim.B.002.95.0151

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 30 Maret 2000

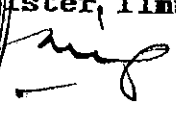
Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

  
Prof. H. Purwahid Patrik, SH

NIP.130.307.058



  
Mengetahui Ketua Program  
Magister, Ilmu Hukum

Prof. Barda Nawawi Arief, SH

NIP.130.350.519

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT kami panjatkan karena hanya dengan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya jugalah tesis ini selesai disusun.

Tesis dengan judul "PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM KASUS LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN NEGERI" ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan dan memperoleh derajat Magister pada Program Studi Pascasarjana (S-2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sebagai manusia biasa yang mempunyai sifat salah dan keterbatasan, maka kami menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tesis ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu segala kritik dan saran guna menyempurnakan tulisan ini sangat kami harapkan. Namun demikian, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan baik dalam praktik maupun khasanah keilmuan.

Diselesaikannya tesis ini tak luput dari peran Prof. Purwahid Patrik, SH, yang disela-sela kesibukan beliau sebagai akademisi, dengan sabar berkenan memberikan bimbingan dan arahan yang memudahkan penulis. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika penulis sampaikan

terima kasih dan hormat yang sedalam-dalamnya.

Kepada Rektor UNDIP Semarang dan Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, SH yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menempuh studi di S-2 UNDIP Semarang ini.

Kepada Bapak/Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP Semarang, atas segala bimbingan dan ilmu yang telah disampaikan selama penulis penulis menempuh pendidikan, penulis sampaikan terima kasih.

Terima kasih juga kepada Bapak/Ibu Hakim, Panitera di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Pekalongan, Bapak DulRohman Sdri Niken dari WALHI, Sdri Sri Lestari dari ICEL yang turut memberikan masukan yang berarti dalam penyusunan tesis ini.

Untuk suami tersayang . Kol.Pol.Drs.H.Sri Soegiarto dan anak-anak tercinta Risa,Rian terimakasih atas doa,dorongan dan pengertiaannya. Terima kasih pula kepada ayah,ibu serta ibunda Suyitno dan segenap keluarga, tak luput kepada teman, sejawat dan para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis sampaikan terima kasih.

Semoga Allah membalas budi baik Bapak, Ibu, Saudara semua.

Semarang, Maret 2000

Dessy Andrea Muslim

## INTISARI

Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu jenis pertanggung jawaban perdata (*civil liability*). Pertanggung jawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Pertanggung jawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggung jawaban :

1. pertanggung jawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*)
2. pertanggung jawaban mutlak/ketat (*strict liability*) suatu pertanggung jawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*)

Konsep pertama tersebut dikenal sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*).

Mengandalkan unsur kesalahan dalam konteks pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi seringkali menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko yang timbul dari suatu kegiatan (industri). Melihat keterbatasan dari *fault based liability* ini maka mungkin terjadi timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan tanpa dapat dikenakan pertanggung jawaban. *Fault based liability* juga memungkinkan pencemar atau perusak lingkungan terbebas dari pertanggung jawaban perdata apabila ia dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan upaya maksimal pencegahan pencemaran melalui pendekatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (dengan melaksanakan RKL dan RPL secara konsisten).

Guna mengatasi hal tersebut maka dikembangkanlah asas tanggung jawab mutlak dalam UU No.23 Tahun 1997, diatur dalam Pasal 35. Di dalam *strict liability*, seseorang bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa pertama, para korban dilepaskan dari beban berat untuk membuktikan adanya

hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individual tergugat. Kedua para pihak pencemar akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya, maupun tingkat kegiatannya. Dua hal ini merupakan kelebihan *strict liability* dari asas kesalahan.

Penerapan asas tanggung jawab mutlak di Pengadilan Negeri masih didasarkan pada ketentuan normatif Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya hakim dalam memeriksa gugatan ganti rugi dalam kasus-kasus lingkungan masih berpijak pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata perihal perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan demikian penggugat seringkali ada dalam posisi lemah karena disini unsur kesalahan memainkan peranan yang penting dalam menentukan bertanggung jawab atau tidaknya seseorang.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan digunakannya asas tanggung jawab mutlak dalam kasus lingkungan di Pengadilan Negeri maka hakim harus dapat menemukan kriteria untuk menentukan apakah sebuah kegiatan dapat ditundukkan pada asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Maka disini hakim pengadilan harus dapat melakukan penemuan hukum atau penggalan kriteria baru dalam rangka penerapan asas tanggung jawab mutlak.

Sebagai salah satu bagian dari konteks penegakan hukum lingkungan, penerapan asas tanggung jawab mutlak tersebut menghadapi beberapa hambatan yang lebih disebabkan karena dari sarana hukumnya, terlihat belum adanya peraturan pelaksanaan lebih lanjut, dari sumber daya manusianya adalah hakim kurang melihat hukum lingkungan secara luas, tetapi sebatas yang tertulis di dalam UU saja.

## SUMMARY

The strict liability principle is one kind of civil liability. The civil liability in context of maintaining the environment justice, is an instrument of civil law for getting the reparation and environmental recovery cost which caused by pollution and or the environment destruction.

The civil liability mentioned, recognizing 2 ( two ) types of liability :

1. a liability which conditioning the fault element ( fault based liability )
2. the strict liability ( a liability without needed the fault's proven )

The first concept has known as inserted in definition of chapter 1365, The Books of Civil Law Act , which are the action against the law. The action against the law based on chapter 1365 of The Books of Civil Law Act conditioning the accuser to prove that there is a fault element.

Relying the fault element ,in context of science and technology development which growing faster, sometimes emerging a difficult problem in predicting the risk which appear from such activity ( Industry ). Considering the confining fault based liability, consequently the pollution or environment destruction might happened without being affect by responsibility. Fault based liability also enables the soiler or the environment destructor free from the civil responsibility if they could prove that they had done a maximal effort in preventing the pollution within the Environment Results Analysis Approach ( by carrying out the RKL and RPL consistently ).

To overcome the problem, the strict liability principle was develop in Act number 23 , 1997 which direct on chapter 35. In the strict liability principle, a person is responsible for the loss however it happened. This statement means that, first, the victims are released from the hard responsibility to prove the causal relation between his loss and the accuser's individuality action. Next, the soiler will paying a good attention for their caution and activity level. These two models showing the abundance of strict liability principle from the fault principle.

The strict liability principle which applied in the district court are still based on normative definition mentioned in chapter 1365, the Book of Civil Law Act, regarding the action against that law. So that the accuser sometimes exists in a weak position, because the fault element playing the important rule in confirming someone if she / he has responsible or not.

For defining the factor which determining the using of strict liability principle in environment case on the district court, the judge must find the criteria in definiting if an action could submitted in the strict liability principle. Thus, the judge must discover the justice or digging the new criteria in addition for applying the strict liability principle.

As a part from the maintenance environment justice, the applying of strict liability principle have found the barrier which often caused by the law materials, it could been seen from the uncontinous action rule, from the human resources sides, the judges could not seen the more widely environment justice, but limited in written act only.



# DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
INTISARI .....	v
ABSTRACT .....	VII
DAFTAR ISI .....	IX
DAFTAR TABEL .....	XI
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Permasalahan .....	9
C. Tinjauan Pustaka .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	20
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	26
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	 28
A. Hukum Lingkungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pengaturannya .....	 28
A.1. Pengertian .....	28
A.1.1. Lingkungan Hidup Dan Hukum Lingkungan .....	 28
A.1.2. Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	32

A.2. Sejarah Perkembangan Hukum Lingkung-	
an .....	36
A.3. Asas, Tujuan dan Sasaran Pengelolaan	
Lingkungan Hidup .....	40
A.4. Hak, Kewajiban Dan Peran Masyarakat	42
B. Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	49
B.1. Pencemaran Lingkungan Hidup .....	49
B.2. Perusakan Lingkungan .....	54
C. Sengketa Lingkungan Hidup Dan Penyelesai-	
an Sengketa Lingkungan Hidup .....	57
C.1. Sengketa Lingkungan Hidup .....	57
C.2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan	
Hidup .....	60
C.2.1. Penyelesaian Sengketa Lingku-	
ngan Hidup Melalui Pengadilan	60
C.2.2. Penyelesaian Sengketa Lingku-	
ngan Di Luar Pengadilan .....	81
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	84
A. Gambaran Umum Permasalahan Lingkungan	
Hidup Dan Kasus Lingkungan Hidup Di In-	
donesia .....	84
B. Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak	
(Strict Liability) Dalam Kasus Lingku-	
ngan Hidup Di Pengadilan Negeri .....	91
C. Faktor-Faktor Yang Menentukan Digunakan-	
nya Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict -	
Liability) Dalam Kasus Lingkungan Hidup	
Di Pengadilan Negeri .....	115

D. Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Kasus Lingkungan Hidup Di Pengadi- lan Negeri .....	123
BAB IV PENUTUP .....	132
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran .....	135

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

hal

TABEL I	JUMLAH KASUS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 1996..	89
TABEL II	MODEL PENYELESAIAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN.	90

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup (SDALH). Selama berabad-abad bumi telah mendukung pelbagai ragam kehidupan dengan segala kebutuhannya, keadaan ini berlangsung terus dengan tidak menimbulkan banyak kesulitan baik terhadap manusia maupun makhluk lainnya. Namun kemudian dengan semakin meningkatnya pembangunan, terjadi perubahan yang bersifat fundamental terhadap keseimbangan lingkungan yaitu terganggunya kualitas dan daya dukung lingkungan sebagai akibat kegiatan eksploitasi SDALH yang tidak terkendali sehingga mencemari dan merusak lingkungan.

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dalam proses pembangunan di berbagai aspek kehidupan, harus memperhitungkan dimensi penduduk disamping dimensi lingkungan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan.

Jumlah penduduk yang besar merupakan modal pembangunan, tetapi dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan kualitas sumber

daya manusia yang rendah dapat merupakan beban bagi pembangunan nasional. *Edward O Wilson* <sup>1</sup> mencatat bahwa keadaan lingkungan sekarang ini dapat diringkas sebagai berikut : Populasi dunia sangat besar, dan akan menjadi lebih besar lagi setelah tahun 2025. Pada tahun 1997, populasi dunia mencapai 5,8 milyar yang berarti tumbuh dengan kecepatan 90 juta kepala pertahun. Pada tahun 1600 hanya ada setengah milyar populasi manusia, dan pada tahun 1940 ada dua milyar.

Tingkat pertumbuhan populasi global mencapai puncaknya sejak tahun 1960-an. Pada tahun 1996 misalnya, setiap wanita melahirkan rata-rata 4,1 anak. Jika dengan program kontrol kelahiran, angkanya adalah 2,1, maka diperkirakan pada tahun 2050 ada 7,7 milyar manusia yang sangat niscaya menjadi 8,5 milyar pada tahun 2150. Mengenai berapa banyak manusia yang dapat ditampung dunia selama satu periode tertentu, para ahli belum bersepakat. Tapi kebanyakan meyakini bahwa estimasi paling optimis adalah berkisar 4-16 milyar.<sup>2</sup>

Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan geometrik bahan-bahan kebutuhan hidup,

---

1. Edward O. Wilson. *Consilience, The Unity of Knowledge, Environmental Policy, Ethics, Social Science, Biology*. New York : Alfreda A Knopp. 1998. hal 13.

2. Edward O Wison. *Ibid*. hal 24.

hanya menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, langsung atau tidak langsung akan bersumber pada sumber daya alami yang cukup tersedia, diantaranya iklim yang menguntungkan, curah hujan yang memberi kecukupan air dan sumber energi matahari yang cukup, memungkinkan segala usaha pembangunan ini memberikan hasil yang didambakan. Supaya pembangunan bisa berlangsung terus menerus, maka sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia memerlukan perawatan, pemeliharaan dan pelestarian.

Berdasarkan pada keserasian lingkungan hidup, maka pertumbuhan penduduk yang maju pesat menjadi masalah besar yang harus diatasi. Disamping laju pertumbuhan penduduk yang harus segera dikendalikan, maka pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sebagai dampak pembangunan perlu direhabilitasi. Dengan semakin maju dan berkembangnya pembangunan, maka perlu ditingkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan serta pengawasannya, sehingga tujuan dari Pembangunan Nasional dapat dicapai secepat mungkin.

Menurut Emil Salim, laju pembangunan yang semakin tinggi tidak akan menjadi hambatan dalam usaha pengelolaan lingkungan hidup apabila dalam pola kebijaksanaan pembangunan tercakup tiga unsur pokok yaitu :

pertama kebijaksanaan pembangunan untuk mencapai materi yang meningkat;

kedua kebijaksanaan untuk mencapai pertumbuhan spiritual yang meningkat:

ketiga kebijaksanaan pembangunan untuk mencapai lingkungan hidup yang lebih beragam bagi pengisian kualitas hidup

yang lebih baik. 3

Hampir setiap hari media massa menyajikan berita-berita tentang pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang terjadi diberbagai daerah. Bila kita telaah penyebab utama terjadinya pencemaran dan atau kerusakan itu terpulang kepada ulah manusia yang tidak atau kurang kepeduliannya terhadap lingkungan dimana kemudian segala akibat yang timbul dari pencemaran dan atau kerusakan itu kembali ditanggung oleh manusia itu sendiri. Terjadinya pencemaran air dan tanah serta polusi udara mengundang kehadiran berbagai penyakit atau kelainan-kelainan biologis pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Perusakan lingkungan telah mengundang berbagai dampak negatif antara lain erosi, merosotnya kualitas kesuburan tanah, banjir, tanah longsor dan ancaman kepunahan berbagai spesies dan sebagainya.

---

3. Emil Salim. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Prisma. September 1978. hal 8.



Untuk menanggulangi aneka rupa bencana yang tercipta karena ulah manusia itu diperlukan rentang waktu yang relatif panjang/lama, biaya yang mahal dan menuntut berbagai upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan

Untuk melindungi lingkungan hidup dari bahaya pencemaran dan kerusakan lingkungan maka sangat diperlukan hukum yang mampu berperan sebagai sarana yang tangguh dalam melindungi lingkungan hidup. Hukum yang berfungsi sebagai pengaman lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan.

Guna mewujudkan perlindungan pemerintah terhadap lingkungan, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum yang terkait dengan masalah lingkungan hidup. Salah satu produk hukum yang sangat penting adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Pasal 5 UUPLH mengemukakan :

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Setiap orang berhak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Setiap orang berhak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pasal ini dapat disimpulkan betapa besar komitmen bangsa Indonesia terhadap masalah lingkungan hidup. Hak yang tercantum dalam pasal 5 UU No.23 Tahun 1997 (UUPLH) merupakan hak yang harus dilindungi dan dihormati oleh siapapun juga. Sebagaimana yang disebutkan dalam Deklarasi *Stockholm* 1972 antara lain berbunyi :<sup>4</sup>

*"Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits of life of dignity and well being and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations....."*

Konprensi *Stockholm* 1972 telah menghasilkan deklarasi yang kemudian dinamakan "*Deklarasi Stockholm*", memuat 26 asas lingkungan hidup. Pasal 1 Deklarasi *Stockholm* sebagaimana tersebut di atas memberi jaminan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagai hak fundamental (*fundamental right*).

Hak fundamental ini menjadi penting, dan dari beberapa negara menjadi sekian banyak negara telah mengakui hak tersebut, baik pengakuan dalam konstitusi maupun perundang-undangan biasa. Pengakuan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik (*right to a decent*

---

4. Purwahid Patrik. Dasar Pengetahuan Hukum Dan Peraturan Kebijakan Lingkungan Hidup. Makalah pada Kursus Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Tipe A). Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. Semarang, 1-13 Agustus 1974.

*environment*) menjadi strategi kebijakan lingkungan hidup di banyak negara.

Kemauan politik (*political will*) dari negara-negara beradab harus diakui sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari kerjasama-kerjasama internasional-bilateral ataupun unilateral setelah konprensi, dengan pengakuan hak tersebut secara tegas dalam konstitusi maupun perundang-undangan, diharapkan dapat memberi arah kebijakan pembangunan dari pemerintah masing-masing.

Fungsi lain pengakuan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, memberikan perlindungan yang sangat luas bagi masyarakat dari kemungkinan adanya pelanggaran hak. Dengan perkataan lain, pengakuan hak tersebut dapat berfungsi sebagai dasar tuntutan (*basic claim*) anggota masyarakat yang dirugikan hak atas lingkungannya.

Kemauan politik pemerintah untuk mengakui dan menegaskan hak tersebut merupakan langkah sangat strategis ke arah pencapaian kebijakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Akan tetapi rekognisi hak seperti itu akan bermakna, apabila tersedia sarana (*means*), metode (*methods*), dan prosedur (*procedure*) untuk menjamin serta memaksa (*enforce*) hak fundamental tersebut. Tanpa kelengkapan sekalian itu, hak fundamental dimaksud hanya akan menjadi simbol dari komitmen pemerintah, dan sebagai konsekuensinya pengakuan hak

tersebut bersifat retorikal.<sup>5</sup>

Data empirik menunjukkan bahwa penanganan kasus-kasus lingkungan di Indonesia dalam kaitannya dengan penegakan hukum (law enforcement) masih sangat rendah kendatipun UU No.4 Tahun 1982 telah mengatur mengenai sanksi yang cukup tegas. Setiap tahunnya angka kasus-kasus lingkungan yang terjadi berjumlah ratusan. Pada tahun 1995, dari data yang dihimpun oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), terdapat 329 kasus lingkungan. Pada tahun 1996 menurun menjadi 191 kasus. Jumlah tersebut diperkirakan 2 kali lipat karena kemungkinan banyak kasus-kasus yang tidak sempat terpantau.<sup>6</sup>

Gugatan perwakilan/kelompok (class action), penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability), hak organisasi lingkungan hidup untuk menggugat (standing NGO), hak atas informasi lingkungan hidup, merupakan sederet masalah prosedural yang sangat relevan dan kontekstual untuk dikaji secara lebih dalam sebagai cara mewujudkan hak fundamental atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

---

5. Abdul Hakim GN. "Sengketa Lingkungan dan Masalah Beban Pembuktian". Makalah dalam Diskusi Dua Hari : Masalah-masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Jakarta 19-20 Juni 1989. hal 47.

6. Buletin Informasi Hukum Dan Advokasi Lingkungan No.01 Tahun V April 1999.hal 2.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan strict liability sebagai salah satu jenis pertanggungjawaban perdata merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, penelitian untuk kepentingan penyusunan tesis ini, akan difokuskan pada Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak Dalam Kasus Lingkungan Hidup Di Pengadilan Negeri.

#### B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam kasus lingkungan hidup di Pengadilan Negeri ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menentukan digunakannya asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam kasus lingkungan hidup di Pengadilan Negeri tersebut?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam kasus lingkungan hidup di Pengadilan Negeri tersebut ?

#### C. TINJAUAN PUSTAKA

Asas tanggung jawab mutlak (strict liability) merupakan salah satu jenis pertanggung jawaban perdata (civil liability). Pertanggung jawaban perdata tersebut

dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.<sup>7</sup>

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.23 Tahun 1997).

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.23 Tahun 1997).

Pertanggung jawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggung jawaban :<sup>8</sup>

1. pertanggung jawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan;
2. pertanggung jawaban ketat/mutlak (*strict liability*), suatu pertanggung jawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan.

Kedua jenis pertanggung jawaban perdata tersebut mengandung masalah tersendiri dan perlu dikaji untuk

---

7. Mas Achmad Santosa. Azas Pertanggung Jawaban Ketat. Buletin Informasi Hukum Dan Advokasi Lingkungan No. 01-Tahun V-April 1999. hal 6.

8. Mas Achmad Santosa. Ibid hal 1.

menemukan unsur pendukung dan penghambat dalam penerapannya terhadap kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Telaah ini hanya ditujukan pada tanggung gugat lingkungan dan beban pembuktian yang diperlukan dalam proses ber perkara di pengadilan.

Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan adalah bentuk pertanggung jawaban yang lazim dikenal dalam doktrin perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Menurut pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang, karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. Sebagaimana diketahui pasal 1365 KUH Perdata ada persamaan dengan pasal 1401 BW Belanda, sedang untuk mendapat ganti kerugian harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan harus bersifat melawan hukum;
2. Pelaku harus salah;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat.

Pasal 1365 BW mengandung konsep "tanggung gugat berdasarkan kesalahan" (*schuld aansprakelijkheid*) yang dapat dipersamakan dengan asas *liability based on fault*

dalam sistem hukum Anglo Amerika.<sup>9</sup> Dalam kasus pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan, penderita/korban berada pada posisi sosial yang relatif lemah dan awam dalam soal hukum berhadapan dengan satu atau sejumlah pencemar/perusak dengan kekuatan ekonomik yang tangguh.

Kekuatan para pihak yang tidak seimbang, ketidakpastian akan berhasil dan risiko terhadap biaya yang tinggi seringkali menimbulkan keengganan bagi korban untuk berperkara di depan pengadilan. Terlebih lagi, terdapat beban pembuktian pada penderita menurut ketentuan pasal 1865 BW :

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membentuk sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

Pasal 1865 BW senada dengan ketentuan prosedural dalam pasal 163 HIR dan pasal 283R.bg tentang beban pembuktian. Sungguh berat dan tidak adil rasanya bila penderita (yang kadang berada dalam keadaan sekarat) dibebani kewajiban membuktikan unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata tersebut.

---

9. Abdul Hakim GN. "Sengketa Lingkungan dan Masalah Beban Pembuktian". Makalah dalam Diskusi Dua Hari Masalah-masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan". Jakarta 19-20 Juni 1989. hal 58.



Kesulitan yang terutama dihadapi penggugat adalah untuk membuktikan unsur kesalahan tergugat sebagai pencemar, dalam arti mengambil langkah-langkah untuk mencegah pencemaran.

Kesulitan berikutnya bagi penggugat adalah untuk membuktikan unsur hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian penderita/penggugat, yang sering menyangkut bahan kimiawi dan terbentur pula pada "rahasia perusahaan". Penggugat dalam hal ini umumnya awam dalam ilmu dan kecanggihan teknologi yang digunakan oleh tergugat/pencemar.

Dalam kaitannya dengan pembuktian tersebut Moestadji menjelaskan antara lain bahwa terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan hasil interaksi (negatif) antara manusia dengan lingkungannya, juga kadang-kadang merupakan hasil kumulatif dari berbagai kegiatan. Inilah yang menimbulkan kesulitan untuk pembuktian dalam sengketa lingkungan, karena untuk memperoleh pembuktian orang harus ke lapangan di mana telah terjadi dampak lingkungan terhadap sifat fisik lingkungan dan atau sifat hayati lingkungan. Terjadinya dampak lingkungan karena adanya kerusakan lingkungan harus diketahui lebih dahulu bagaimana rona lingkungan awal dan bagaimana kondisi lingkungan setelah terjadi kegiatan.

tan. 10

Perkembangan industri modern telah membawa serta sejumlah risiko yang terjadi setiap hari, yang tidak dapat dihindarkan dari sudut ekonomi. Ia telah menimbulkan derita dan bagi si penderita hal tersebut tidak dapat ditanggungnya tanpa suatu ganti kerugian.

Oleh karena itu untuk mengatasi keterbatasan gugatan ganti kerugian yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*), dikembangkanlah asas pertanggung jawaban ketat (*strict liability*) yang terlanjur diterjemahkan dan dikenal secara umum di Indonesia dengan istilah "tanggung jawab mutlak".<sup>11</sup>

Pasal 34 UU No.23 Tahun 1997 mengatur ketentuan tentang dibukanya kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan atas kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya pasal 35 UU No.23 Tahun 1997 mengatur tentang diterapkannya sistem tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dalam pasal 35 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 disebutkan bahwa :

Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terha-

---

10. Moestadji. Peranan Ilmu Bagi Pembuktian Dalam Sengketa Lingkungan. Makalah Diskusi. Jakarta. 1989.

11. Mas Achmad Santosa. Opcit hal 7.

dap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dari pasal 35 ayat 1 tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diterapkan dalam hal adanya :

- usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
- menggunakan bahan berbahaya dan beracun;
- dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya atau beracun.

Adanya pasal 34 dan 35 UU No.23 Tahun 1997 tersebut dapat dikatakan merupakan langkah yang lebih maju dari pada Undang-Undang yang lama (Undang-Undang No.4 Tahun 1982), sebab dalam Undang-Undang yang lama tersebut, mengenai ganti kerugian dan biaya pemulihan ditentukan dalam Bab VI yang terdiri hanya dua pasal, yaitu pasal 20 dan pasal 21.

Dalam pasal 20 ayat 2 dikaitkan dengan Penjelasannya, diatur bahwa penyelesaian ganti kerugian harus ditempuh melalui mekanisme suatu TIM dan barulah bila-mana tidak dapat tercapai kata sepakat dalam batas tertentu melalui TIM tersebut, maka sebagai solutionnya kemudian dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri.

Selanjutnya pasal 21 dikaitkan dengan penjelasan

mengatur bahwa tanggung jawab mutlak dikenakan secara selektif atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud.

Sekalipun substansi yang terkandung dalam kedua pasal tersebut juga dimuat kembali dalam Undang-Undang yang baru (UU No.23 Tahun 1997), namun dalam UU yang baru dijabarkan secara lebih terperinci agar lebih operasional dan efektif.

Kembali pada ketentuan pasal 35 bahwa melalui pasal 35 tersebut tidak perlu lagi dilihat atau dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si pelaku pencemaran dan atau kerusakan untuk mengharuskannya membayar ganti rugi atau kompensasi ke si korban pencemaran (Bandingkan dengan pasal 1365 KUH Perdata).

Dikarenakan penggugat tidak dibebani adanya kesalahan (*fault*), maka tergugatlah yang dibebani pembuktian yakni upaya pembuktian bahwa dirinya bukan penyebab kerugian yang didalilkan. Dengan demikian secara otomatis beban pembuktian ada pada diri tergugat sehingga terjadi beban pembuktian terbalik (*shyifting burden of*

*proof*).<sup>12</sup>

Selanjutnya keharusan membayar kompensasi itu harus lebih dilihat pada risiko yang ada pada kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, yang berbahaya ataupun berpotensi untuk menimbulkan efek yang berbahaya bagi seseorang dan atau masyarakat, maupun lingkungan.<sup>13</sup>

Adanya risiko ini menjadi dasar utama bagi kewajiban si pelaku kegiatan tersebut untuk memberikan kompensasi, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesalahan yang dilakukannya, sesuai dengan asas "si pencemar membayar" (*polluter pays principle*) dalam Hukum Lingkungan.

Sebetulnya yang mulai menyebarluaskan asas pencemar membayar adalah *OECD (The Organisation of Economic Cooperation and Development)*, yang kemudian diikuti oleh negara-negara anggota maupun bukan anggota *OECD*. Dan asas ini erat hubungannya dengan prinsip ekonomi yang dijelaskan dalam *Sub-Committee of Economic Ex-*

---

12. Mas Achmad Santosa dkk. Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup. Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta. 1997. hal 58.

13. Paulus Effendi Lotulung. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam UU No.23 Tahun 1997 Ditinjau Dari Aspek hukum Perdata. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 21 Pebruari 1998.

perts :14

*That the internalization of external effects connected with the environment obeyed an economic efficiency principle which provided a basis for a pollution control policy.*

Dengan demikian asas pencemar membayar digunakan untuk alokasi dana bagi tindakan-tindakan pencegahan dan pengawasan demi kepentingan nasional dalam mendukung sumber-sumber lingkungan yang langka dan menghindari keadaan yang tidak baik untuk perdagangan dan investasi internasional. Asas ini berarti bahwa pencemar wajib menanggung segala biaya untuk melaksanakan tindakan-tindakan di atas yang telah ditetapkan oleh penguasa umum untuk menjaga agar lingkungan tetap dalam keadaan baik.<sup>15</sup>

Selanjutnya pengertian *strict liability* tersebut haruslah dibedakan dari pengertian *absolute liability*, yaitu bahwa dalam *strict liability* masih dimungkinkan adanya kelonggaran-kelonggaran sebagai dasar pembelaan, bahwa pencemaran terjadi karena *act of god* atau karena perang, atau karena tindakan dan pelanggaran pihak

---

14. Purwahid Patrik. Dasar Pengetahuan Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan Lingkungan Hidup. Makalah dalam Kursus Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Tipe A). Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang, 1-13 Agustus 1994. hal 16.

15. Purwahid Patrik. Ibid. hal 16.

ketiga, atau karena kelalaian si korban sendiri.  
(Periksa pasal 35 ayat 2 UU No.23 Tahun 1997)

Asas *strict liability* itu juga terkandung dalam beberapa peraturan di Indonesia, maupun dalam beberapa Konvensi Internasional.

Beberapa peraturan di Indonesia yang memuat asas tersebut adalah :

- Konvensi tentang pencemaran minyak yaitu *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC)* yang diratifikasi berdasar Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978.

Asas tanggung jawab mutlak yang diterapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.18 Tahun 1978 Tentang Pengesahan *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC)* tersebut dalam pasal III (1), mengatur :

*"Percept as provided in paragraphs 2 and 3 of this article, the owner of a ship at the time of an incident, or where the incident consists of a series of occurrences, at the time of the first such occurrences, shall be liable for any pollution damage caused or been discharged from the ship as a result of the insident"*

- Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Z.E.E).

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menerapk-  
kan :

"Dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barang siapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah memadai".

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenag nukliran.

Pasal 28 UU No.10 Tahun 1997 tersebut menyebutkan :  
"Pengusaha instalasi nuklir bertanggung jawab atas kerugian nuklir yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi dalam instalasi nuklir tersebut".

Dengan diterapkannya asas "*strict liability*" dalam perundang-undangan lingkungan, dimaksudkan antara lain juga agar mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk memperhatikan biaya sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya.

#### D. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan mengungkapkan tanggung jawab mutlak oleh pengadilan dalam kasus lingkungan . Sedangkan secara khusus dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui dan mengkaji bagaimana penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) oleh Pengadilan Negeri dalam kasus lingkungan hidup ? .
2. Memperoleh gambaran tentang faktor-faktor penentu diterapkannya asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus lingkungan hidup ?



5. Mengkaji dan mengungkapkan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tersebut oleh Pengadilan Negeri.

#### E. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut :

##### a. Praktis

1. Diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengadilan dan pengambil keputusan tentang permasalahan sekitar penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.
2. Bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai masukan mengenai aspek hukum tanggung jawab mutlak (*strict liability*), serta penerapannya oleh pengadilan dalam kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

##### b. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan data, konsep dan metode bagi pengkajian hukum, khususnya berkaitan dengan penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis-normatif yang bertumpu pada data sekunder. Untuk kepentingan perbandingan, maka akan dilengkapi pendekatan yuridis empiris yang bertumpu pada data primer.<sup>16</sup>

Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/horisontal diterapkan dan untuk menemukan hukum bagi suatu perkara in-concreto. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses penerapan hukum (asas tanggung jawab mutlak) dalam kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai penelitian deskriptif analisis, yaitu akan berusaha mencari data yang seteliti mungkin tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak dalam kasus pencema-

---

16. Penelitian hukum dibedakan menjadi penelitian hukum yang normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder; penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. 1994. Jakarta : Ghalia Indonesia. hal 110.

ran dan atau merusakkan lingkungan di Pengadilan Negeri , untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut sesuai permasalahan yang dirumuskan, dan akhirnya dibuat suatu deskripsi yang faktual dan akurat terhadap hasil penelitian sehingga dapat menggambarkan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

### 3. Metode Penentuan Sampel

#### a. Populasi penelitian

Populasi penelitian ini adalah kasus-kasus lingkungan hidup yang masuk di Pengadilan Negeri.<sup>17</sup>

(Kasus Perdata)

#### b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, dimana tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan.

Teknik penelitian ini adalah teknik penelitian sasaran atau penarikan sampel berdasarkan pada terwakilinya karakteristik utama dari populasi.

Ciri sampling ini adalah penilaian dan upaya

---

17. Ronny Hanitijo. Op cit hal 45. Beliau menjelaskan bahwa : "Populasi itu tidak selalu harus berwujud manusia saja, tetapi dapat berupa gejala, tingkah laku-tingkah laku, pasal perundangan, kasus-kasus hukum, alat-alat pengajaran, cara-cara penyelenggaraan administrasi dan lain-lain".

cermat untuk memperoleh sampel representatif dengan cara meliputi wilayah-wilayah atau kelompok-kelompok yang diduga sebagai anggota sampelnya.

c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para hakim yang menangani kasus-kasus lingkungan hidup ditambah pegawai dari Kantor Kependudukan dan Lingkungan Hidup serta dari WALHI sebagai nara sumber. Ada beberapa kriteria utama yang dipakai untuk menentukan responden dalam penelitian ini. Pertama, yang bersangkutan adalah seorang hakim yang masih aktif berpraktek di Pengadilan Negeri. Dan kedua yang bersangkutan pernah menangani perkara pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

4. Metode Pengumpulan Data

Data studi ini terdiri dari data sekunder yang ditunjang dengan data primer. Data sekunder dilakukan dengan cara mengcover semua kasus-kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan serta dengan studi kepustakaan dan dokumen-dokumen atau publikasi resmi dari berbagai instansi yang terkait dengan obyek penelitian.

Data primer dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan .

a. Observasi

Metode observasi dilaksanakan setelah focus penelitian ditetapkan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan pada kasus-kasus lingkungan hidup di Pengadilan Negeri yang dimaksud dan pengamatan pada perusahaan-perusahaan yang pernah mengalami kasus sengketa lingkungan hidup yang sampai pada proses peradilan.

b. Wawancara

Untuk membandingkan ide awal/fokus yang telah dirumuskan, maka dilakukan wawancara . Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan kepada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan (*focused interview*).<sup>18</sup>

5. Metode Analisis Data

Jika proses pengumpulan data telah selesai, maka pengolahan terhadap data tersebut dilakukan

---

18. Ronny Hanitijo Soemitro. Opcit hal 60-61.

dengan editing dan menyusun data-data tersebut sesuai perumusan permasalahan penelitian. Data yang telah tersusun secara sistematis itu akan dianalisis, dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.<sup>19</sup> Analisis normatif maksudnya adalah melakukan analisis terhadap peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang mengatur asas tanggung jawab mutlak. Norma-norma hukum itu akan dikaitkan dengan penerapan asas tanggung jawab mutlak dalam kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang terjadi di lapangan. Sedangkan analisis kualitatif adalah melakukan analisis secara deskriptif dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan para responden, artinya analisis tidak menggunakan perhitungan angka secara kuantitatif.

#### G. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) Bab. Pada Bab I diuraikan tentang A. Latar belakang penelitian, B. Perumusan masalah C. Tinjauan pustaka, D. Tujuan penelitian, E. Kegunaan penelitian, F. Metode penelitian, G. Sistimatika penulisan. Pada Bab II diuraikan tentang Tinjauan Pustaka yang mempunyai kaitan dengan Penerapan Asas Tanggung

---

19. Ronny Hanitijo Soemitro. Op.cit. hal 35.

Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Pada Kasus Lingkungan Hidup Di Pengadilan Negeri yang meliputi : A. Hukum Lingkungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pengaturannya B. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup C. Sengketa Lingkungan Hidup selanjutnya Bab III merupakan Hasil Penelitian dan Analisa Data yang berisikan A. Penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus lingkungan hidup di Pengadilan Negeri, B. Faktor-Faktor yang menentukan digunakannya asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus lingkungan hidup di Pengadilan Negeri, C. Hambatan-hambatan penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus lingkungan hidup di Pengadilan Negeri. Bab IV adalah Penutup yang berisi A. Kesimpulan dan B. Saran.

## B A B    I I

### T I N J A U A N    P U S T A K A

#### A. Hukum Lingkungan , Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pengaturannya.

##### A.1. Pengertian

##### A.1.1. Lingkungan Hidup Dan Hukum Lingkungan

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda,daya,keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup diartikan juga sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkupnya dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.<sup>1</sup>

---

1. Emil Salim. Peran Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement). Sambutan Lokakarya. 1991. hal 14-15.



Lingkungan hidup dikatakan juga sebagai jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.<sup>2</sup>

Dengan demikian secara garis besarnya lingkungan hidup manusia itu dapat digolongkan atas 3 (tiga) golongan :

1. Lingkungan fisik (*Physical Environment*)

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain semacamnya.

2. Lingkungan biologis (*Biological Environment*)

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang

---

2. Otto Sumarwoto. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta : Djambatan. 1985. hal 30.

berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lain selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lain.

### 3. Lingkungan Sosial (*Social Environment*)

Lingkungan sosial adalah manusia-manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain. 3

Dari uraian tersebut di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai hubungan secara bertimbal balik dengan lingkungannya. Manusia di dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana ia hidup dalam artian manusia dengan berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi lingkungannya dan perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya membentuk suatu sistem yang lazim disebut dengan ekosistem.

Selanjutnya mengingat manusia dalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan "alam" agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti, pula agar dapat diikuti serta ditaati oleh semua pihak, maka perlu perlindungan

---

3. Fuad Amsyari. Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1977. hal 11-12.

dan pengamanan itu dituangkan dalam peraturan hukum . Sehingga kemudian lahir jenis hukum yang secara khusus diciptakan dengan maksud dan tujuan terpokok untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup yang disebut : "hukum lingkungan hidup" atau secara singkat dinamakan : Hukum Lingkungan.<sup>4</sup>

Hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup).<sup>5</sup>

Hukum lingkungan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, perkembangannya masih relatif baru, yakni sejalan dengan perhatian terhadap perkembangan masalah-masalah lingkungan, perhatian secara sungguh-sungguh terhadap masalah lingkungan, baru mulai pada dasawarsa 1970-an, yakni setelah diselenggarakannya konferensi Stockholm 1972. Seiring dengan perhatian bangsa-bangsa terhadap masalah-masalah lingkungan, yang intensitasnya semakin kompleks, maka hukum lingkungan pun mendapatkan perhatian yang lebih serius pula.

Munadjat Danusaputro, membedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *Environment-Oriented Law* dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau

---

4. St.Munadjat Danusaputro. Opcit. hal 105.

5. St.Munadjat Danusaputro. Ibid hal 67.

### *Use-Oriented Law.*

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>6</sup>

Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh-menyeluruh atau komprehensif-integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedang sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar berubah.<sup>7</sup>

#### **A.1.2. Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Adapun pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang No.23 Tahun 1997 adalah upaya terpadu untuk

---

6. Harun M.Husein. 1992. *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. hal 38.

7. Harun M.Husein. *Ibid* hal 35.

melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan tersebut diartikan pula sebagai usaha secara sadar untuk memelihara dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Karena persepsi tentang kebutuhan dasar terutama untuk kelangsungan hidup manusia tidak sama untuk semua golongan masyarakat dan berubah dari waktu ke waktu, pengelolaan lingkungan harus bersifat lentur. Dengan kelenturan itu kita berusaha untuk tidak menutup pilihan golongan masyarakat tertentu untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya atau menutup secara dini pilihan kita untuk kemudian hari.<sup>8</sup>

Pengelolaan lingkungan tersebut mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka pula. Pertama, ialah pengelolaan lingkungan secara rutin. Kedua, perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan. Ketiga, ialah perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan. Ke empat, ialah perencanaan

---

8. Otto Soemarwoto. Op.cit.hal 69.

pengelolaan lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena alamiah maupun karena tindakan manusia.

Pengelolaan lingkungan yang akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian ialah yang mencakup aspek ke tiga dan ke empat, yaitu untuk rencana proyek pembangunan dan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu pengelolaan lebih bersifat reaktif, yaitu bereaksi terhadap suatu perencanaan atau keadaan tertentu. Hal ini menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pengelolaan lingkungan yaitu menjurus pada anggapan bahwa pengelolaan lingkungan menghambat pembangunan.<sup>9</sup>

Bagi bangsa Indonesia, dalam memikirkan sistem pengelolaan lingkungan yang setepat-tepatnya, pertamanya kita harus melihat ketentuan dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar seluruh peraturan hukum di Indonesia. Dalam UUD 1945 tersebut, terdapat dua ketentuan konstitusional yang berhubungan dengan sistem pengelolaan lingkungan,

- a. Pembukaan UUD 1945, pokok alinea ke empat, dan
- b. Pasal 33 (ayat 3) UUD 1945.

Dari Pembukaan UUD 1945 pokok alinea ke empat tersebut, dapatlah dikemukakan adanya tiga hal prinsipal yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup di

---

9. Otto Soemarwoto. Ibid.hal 84.

Indonesia, yaitu :

1. "melindungi segenap bangsa Indonesia", yang dapat diartikan bahwa pengelolaan lingkungan di Indonesia harus kearah perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia;
2. "seluruh tumpah darah Indonesia", yang dapat diartikan bahwa pengelolaan lingkungan di Indonesia harus ditujukan pada Wawasan Nusantara;
3. "kesejahteraan umum", yang dapat diartikan bahwa pengelolaan lingkungan di Indonesia harus ditujukan pada kesejahteraan umum.

Dari prinsip-prinsip tersebut, dapatlah ditambahkan bahwa pengelolaan lingkungan di Indonesia merupakan usaha secara sadar untuk memelihara dan memperbaiki seluruh lingkungan hidup dalam sumber daya insaninya dan hayati demi tercapainya perlindungan segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan demi kesejahteraan umum.

Selanjutnya pemikiran dasar tersebut dirumuskan secara lebih konkrit dalam pasal 33 (ayat 3) UUD 1945, yaitu bahwa "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari ketentuan pasal tersebut, tampak jelas adanya hak dan kewajiban negara terhadap seluruh sumber daya

alam, yaitu hak penguasaan dan kewajiban menggunakan sumber daya alam demi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada sisinya yang lain tampak pula hak umum (negara) berhadapan dengan hak pribadi (warganegara) dalam menguasai dan menggunakan lingkungan hidup berikut sumber dayanya.

Hak penguasaan oleh negara, memberikan wewenang pada negara untuk :<sup>10</sup>

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, penyediaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengembangan sumber daya alam untuk memelihara dan menjamin kelangsungan serta kelestariannya;
2. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai sumber daya alam, demi untuk melindungi dan menjamin kelangsungan serta kelestarian lingkungan hidup.

#### A.2. Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan

Sejarah perkembangan hukum lingkungan Indonesia ditinjau dari segi perangkat perundang-undangnya dapat dibagi dalam tiga periode :

##### a. Zaman Hindia Belanda

Sebagaimana tercantum dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup yang

---

10. Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1994. hal 99.



disusun oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup yang diterbitkan pada tanggal 5 Juni 1978, pertama kali diatur mengenai mengenai perikanan mutiara dan perikanan bunga karang yaitu *Parelvischerij, Sponsenvisscherijordonnatie* (STBL, 1916 Nomor 157), dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jendral *Idenburg* pada tanggal 26 Januari 1916.

Di bidang perikanan, pada tanggal 26 Mei 1920, dengan Penetapan Gubernur Jendral Nomor 86 telah diterbitkan *Visscherijordonnantie* (STBL, 1920 Nomor 396), yaitu peraturan perikanan untuk melindungi keadaan ikan. Dalam pasal 2 ditentukan, bahwa menangkap ikan dengan bahan-bahan beracun bius atau bahan-bahan peledak dilarang. Ordonansi lainnya di bidang perikanan adalah *Kustvisscherijordonnantie* (STB, 1927 Nomor 144), berlaku sejak tanggal 1 September 1927.

*Hiderordonnantie* (STB, 1940 Nomor 450) merupakan ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan hidup yaitu Ordonansi Gangguan. Selanjutnya ordonansi di bidang perlindungan satwa adalah *Dierensbeschermingsordonnantie* (STBL, 1931 Nomor 134) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1931 untuk seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia).

Di bidang perburuhan yaitu *Jaschtordonnantie* (STBL, 1940 Nomor 733) yang berlaku untuk Jawa dan Madura sejak tanggal 1 Juli 1940. *Jaschtprdonnantie* tahun 1940 ini mencabut *Jaschtordonnantie Java en Madura 1931* (STB, 1931 Nomor 133).

Di bidang perusahaan tyelah dikeluarkan *Bedrijfs reglemeneringsordonnantie 1934* (STB, 1938 Nomor 86 jo. STB 1948 Nomor 244) Ordonansi yang mengatur perlindungan alam adalah *Natuurbeschermingsordinnantie 1932* (STB, 1941 Nomor 167). Ordonansi ini mencabut ordonansi yang mengatur cagar alam dan suaka-suaka margasatwa, yaitu *Natuurmonumenten en Wildreservatenordonnantie 1932* (STB 1932 Nomor 17) dan menggantikannya dengan *Natuurbescher mingsordonnantie 1941* tersebut. Ordonansi tersebut dikeluarkan untuk melindungi kekayaan alam di Hindia Belanda (Indonesia). Peraturan-peraturan yang tercantum di dalamnya berlaku terhadap suaka-suaka margasatwa dan cagar-cagar alam. Dalam hubungannya dengan pembentukan kota telah dikeluarkan *Stadsvormingsordonnantie* (STB 1948 Nomor 168) disingkat SVO yang mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 1948.

b. Zaman Jepang

Pada zaman pendudukan Jepang, hampir tidak ada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan

hidup yang dikeluarkan, kecuali *Osamu S. Kanrei* Nomor 6, yaitu mengenai larangan menebang pohon aghata, alba dan balsem tanpa izin *Gunseikan*. Peraturan perundang-undangan ini di waktu itu terutama ditujukan untuk memperkuat kedudukan penguasa Jepang.

c. Zaman Kemerdekaan

Adapun peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setelah kemerdekaan RI, antara lain terdiri dari :

1. Undang-Undang No.9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
2. Undang-Undang No.44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang No.2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman;
4. Undang-Undang No.11 Tahun 1961 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum;
5. Undang-Undang No.31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom;
6. Undang-Undang No.22 Tahun 1966 tentang Hygiene;
7. Undang-Undang No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
8. Undang-Undang No.6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan;

10. Undang-Undang No.3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi;
11. Undang-Undang RI No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
12. Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif;
14. Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
15. Undang-Undang No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
16. Undang-Undang No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
17. Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
18. Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
19. Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**A.3. Asas, Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Mengenai asas pengelolaan lingkungan hidup, secara eksplisit disebut dalam pasal 3 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut berbunyi demikian :

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam penjelasan pasal 3 tersebut disebutkan bahwa berdasarkan asas tanggungjawab negara, di satu sisi, negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yuridiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yuridiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah negara. Asas keberlanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk melaksanakannya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup, harus dilestarikan. Kelestarian kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan.

Selanjutnya sasaran pengelolaan lingkungan hidup tersebut adalah :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi

- dan membina lingkungan hidup;
- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  - d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
  - f. terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

### A.3. Hak, Kewajiban Dan Peran Masyarakat

Hak menurut *Van Apeldoorn* adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.<sup>11</sup>

Menurut hukum pengertian tentang hak ada dua, yaitu :

1. Suatu hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang dilindungi oleh hukum yang menimbulkan kewajiban kepada orang lain untuk menghormatinya. Hubungan ini dilindungi oleh hukum. Apabila hubungan itu tidak dilindungi oleh hukum, maka hal tersebut bukan disebut hak.

---

11. L.J. Apeldoorn. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita

Pada pengertian di atas, karena hubungan itu dengan obyek hukum, maka hak tersebut disebut dengan hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat suatu apapun terhadap suatu benda, dan hak kebendaan ini menuntut adanya penghormatan dari siapa saja, oleh karena itu hak ini disebut dengan hak absolut. Sifat absolut ini tidak semata-mata datang dari orang lain, tetapi datang dari si subyek hukum sendiri.

2. Suatu hubungan hukum antara subyek hukum dengan subyek hukum lain dengan perantaraan obyek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban pada salah satu pihak untuk mentaatinya.

Karena hal itu merupakan hubungan hukum antara subyek hukum dengan subyek hukum lain, maka hal ini disebut dengan hak pribadi atau hak perseorangan, yaitu yang menimbulkan kewajiban pada salah satu pihak untuk berbuat sesuatu demi kepentingan pihak lainnya, oleh karena itu hak ini disebut hak relatif karena orangnya atau subyeknya tidak tetap dan selalu berganti-ganti.

Tentang hak dan kewajiban Satjipto Rahardjo menyatakan, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Pengalokasian kekua-

saan dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Oleh karena itu tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepadanya.

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut ;

- a. hak itu ditujukan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu. Ia juga disebut orang yang memiliki titel atas barang yang jadi sasaran hak;
- b. hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang korelatif;
- c. hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*comission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak;
- d. *comission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai obyek dari hak;
- e. setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak pada pemiliknya.

Konsep hak sebagaimana disampaikan di atas, merupa-



kan konsep yang sering dipakai. konsep ini terutama menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan kewajiban.<sup>12</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan, hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin dengan adanya kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak, maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Kalau hukum itu sifatnya umum karena berlaku bagi semua orang, maka hak dan kewajiban sifatnya individual, melekat pada setiap individu.<sup>13</sup>

Apabila konsep-konsep hak dan kewajiban tersebut dihubungkan dengan masalah lingkungan hidup, UUPH secara nyata dan jelas mengakui dan sekaligus mengatur tentang adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang.

Hak dan kewajiban itu diatur dalam pasal 5 UUPH yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

---

12. Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung : Alumni. hal 95-98.

13. Sudikno Mertokusumo. 1988. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta : Liberty. hal 39.

- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, melalui pasal 5 UUPH diberikan arti yang penting kepada manusia sebagai seseorang yang mandiri, dan kepada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap sesama manusia lainnya, dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban di atas, tujuan UUPH mengatur hak dan kewajiban tersebut adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap orang dalam masyarakat, sebab kepentingan-kepentingan tersebut dapat saling berbenturan. Agar kepentingan-kepentingan itu tidak saling berbenturan, maka perlu diadakan pengaturan kepentingan.

Atas dasar konsep-konsep hak dan kewajiban yang terdapat dalam pasal 5 UUPH, maka dapat dikatakan bahwa hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak individual atau perseorangan yang bersifat asasi.

Oleh Koesnadi Hardjasoemantri, hak perseorangan

---

14. Koesnadi Hardjasoemantri. 1990. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta : Gadjah Mada University. hal 128.

merupakan bentuk perlindungan yang paling luas karena hak tersebut memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingan-kepentingannya terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati. Penegakan hak tersebut disertai dengan landasan tuntutan yang didukung oleh prosedur hukum, perlindungan hukum oleh pengadilan, dan perangkat-perangkat lainnya .

Heinhard Steiger, dkk, seperti yang dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan, tuntutan hak tersebut mempunyai dua fungsi yang berbeda, yaitu :<sup>15</sup>

- 1) *the function of defense (Abwehrfunktion), the right of the individual to defend himself against an interference with his environment which is to his disadvantage;*
- 2) *the function of performance (Leistungsfunktion), the right of the individual to demand the performance of an act in order to preserve, to restore or to improve his environment .*

Dari kedua fungsi hak tersebut, fungsi pertama, yaitu yang dikaitkan dengan hak untuk membela diri terhadap gangguan yang datangnya dari luar, di dalam UUPH tertampung dalam pasal 34 ayat 1, sedangkan fungsi kedua, yaitu yang dikaitkan dengan hak menuntut untuk dilakukannya suatu tindakan agar lingkungan hidup dapat dilestarikan, dipulihkan keadaannya atau diper-

---

15. Koesnadi Hardjasoemantri. Ibid hal 128.

baiki dalam UUPH tertampung dalam pasal 34 ayat 2 UUPH.

Di samping pasal 5 UUPH, hak dan kewajiban tersebut diatur pula dalam pasal 6 UUPH yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya tentang peran serta masyarakat UU No.23 Tahun 1997 mengatur bahwa :

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara :
  - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemiskinan;
  - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - d. memberikan saran pendapat;
  - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan pendapat.

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Demikian pula dengan meningkatkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan

meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya dengan meningkatkan ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif. Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti. (Pasal 7 dan Penjelasannya)

## B. Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

### B.1. Pencemaran Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup yang umumnya terjadi adalah rusaknya lingkungan dan pencemaran, dalam hal ini Otto Soemarwoto menyatakan, masalah lingkungan yang menonjol saat ini adalah pencemaran, yaitu pencemaran udara, tanah, dan air oleh gas buangan pembakaran mesin-mesin pabrik dan mobil, pestisida dan limbah pabrik.<sup>16</sup>

*Robert S. MC Namara* seperti yang dikutip oleh Antariksa Sudikno menyatakan, dengan terjadinya pencemaran lingkungan akan menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia, erosi tanah, sanitasi, persediaan air, krisis energi, populasi, dan rusaknya sumber daya

---

16. Otto Soemarwoto. 1976. *Permasalahan Lingkungan Hidup*. Kertas Seminar Segi-Segi Hukum Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup. BPHN. hal 31.

alam .17

Pencemaran lingkungan menurut pasal 1 butir 12 adalah :

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur pencemaran sebagai berikut :

1. masuknya atau dimasukkannya zat pencemar ke dalam lingkungan;
2. adanya kegiatan manusia;
3. turunnya kualitas lingkungan;
4. timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya

Menurut *EQA* pencemaran lingkungan adalah :<sup>18</sup>  
*"Pollution any direct or indirect alternation of the physical, thermal, biological, or radioactive properties of any part of the environment by discharging, emitting, or depositing wastes so as so effect any beneficial use adversely, to cause a condition which is hazaedous or potentially hazardous to public healht safety, or welfare, or to animals, birds, wildlife, fish or aquatic life, or to plants or to cause a contravention of any condition, limitation, or restriction to wich a licence under this Act is subject"*

---

17. Antariksa Sudikno. 1987. *Sebuah Permasalahan Di Dalam Lingkungan*. Yogyakarta : Liberty. hal 54.

18. Koesnadi Hardjasoemantri. *Opcit*. hal 427.

Vogel sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman merumuskan pencemaran sebagai berikut :

"Pencemaran lingkungan adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia terhadap lingkungannya dan biasanya penambahan itu memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan tersebut"

Selanjutnya pencemaran lingkungan itu mempunyai komponen dasar, yaitu :

- a. Lingkungan yang terkena adalah lingkungan hidup manusia;
- b. Yang terkena akibat negatif adalah manusianya;
- c. Terdapatnya "bahan berbahaya" yang juga merupakan atau disebabkan oleh aktivitas manusia, yang pada akhirnya merugikan eksistensi manusia sendiri.<sup>19</sup>

Secara garis besarnya masalah pencemaran dan bahan pencemarnya diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Masalah pencemaran, antara lain :
  - 1). Pencemaran udara;
  - 2). Pencemaran air;
  - 3). Pencemaran tanah; dan
  - 4). Pencemaran kebudayaan.
- b. Bahan pencemarannya diklasifikasikan sebagai berikut :

---

19. Fuad Amsyari. Ibid.hal 50.

dan membina lingkungan hidup;

- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran akan terjadi apabila dalam lingkungan hidup manusia (baik lingkungan fisik, biologis, dan sosialnya) terdapat suatu bahan dalam konsentrasi sedemikian besar, yang dihasilkan oleh aktivitas manusia itu sendiri, yang akhirnya merugikan eksistensi manusia. Dalam hal ini bahan pencemar dikenal sebagai "pollutan" sedang pencemarannya dinamakan peristiwa polusi atau "Pollution".

Pada perkembangannya, bahan pencemar ini mencakup bahan yang bersifat materiil dan bersifat immateriil seperti tingkah laku manusia yang dapat mendatangkan bencana baik pada lingkungan disekitarnya (tidak langsung) maupun malapetaka kepada manusia sendiri (langsung). Pada bencana tidak langsung, misalnya penebangan atau penggundulan hutan yang mengakibatkan erosi tanah,



banjir di hilir, dan lain sebagainya. Sedangkan pencemaran yang langsung seperti penggunaan pestisida, insektisida dan sebagainya dapat menimbulkan penyakit bahkan kematian bagi manusia.

Sejalan dengan hal di atas, Soedjono Dirdjosisworo menyatakan secara mendasar dalam pencemaran terkandung pengertian pengotoran (*contamination*) dan pemburukan (*deterioration*) terhadap sesuatu yang pada akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya .<sup>20</sup>

Dilihat dari segi ilmiah lingkungan hidup disebut tercemar apabila :<sup>21</sup>

- (1) suatu zat, organisme atau unsur-unsur lain seperti gas, cahaya, energi dan sebagainya telah tercemar (terintroduksi) ke dalam sumber daya atau lingkungan;
- (2) akibatnya menghalangi atau mengganggu fungsi atau peruntukkan dari sumber daya atau lingkungan tersebut.

Apabila salah satu keadaan di atas belum atau tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan telah terjadi pencemaran. Contohnya, suatu zat telah tercampur pada air minum, tetapi tidak mengganggu kesehatan bagi siapa

---

20. Soedjono Dirdjosisworo. Ibid hal 21.

21. Harun M.Husein. Ibid hal 175.

saja yang meminumnya atau tidak mengganggu kegunaan air itu untuk kepentingan lainnya, maka disini tidak dapat dikatakan bahwa air minum tersebut telah tercemar, oleh karena itu pencemaran harus dibedakan dengan pengotoran (*contaminasi*). Pengotoran (*contaminasi*) adalah terjadinya perubahan kualitas air karena ia bercampur dengan bahan lain tetapi tidak mengganggu peruntukkan/kegunaan.

## B.2. Perusakan Lingkungan

Apabila terjadi suatu aktivitas terhadap lingkungan atau kehadiran benda-benda asing ke dalam lingkungan, menimbulkan gangguan pada ekosistem lingkungan, yang menyebabkan timbulnya perubahan pada sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan, sehingga karenanya fungsi lingkungan sebagai sarana pendukung terlanjutkannya pembangunan tidak atau kurang terpenuhi lagi. Dalam keadaan demikian, secara ekologis dikatakan lingkungan hidup telah mengalami perusakan. Misalnya, penebangan hutan yang sedemikian rupa luasnya, sehingga hutan menjadi gundul dan karena itu fungsi hutan sebagai pengatur tata guna air terganggu (fungsi hidrologis) terjadi banjir dan erosi, menurunnya tingkat kesuburan tanah, terganggunya proses fotosintesis dan sebagainya. Dalam keadaan demikian, dikatakan telah terjadi perusakan lingkungan hidup.

Menurut pasal 1 angka 14 UUPLH perusakan lingkungan

dinyatakan sebagai berikut :

"Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayatinya, yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan"

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur perusakan lingkungan yang meliputi :

1. adanya suatu tindakan manusia;
2. terjadinya perubahan terhadap[ sifat fisik lingkungan dan/atau sifat hayati lingkungan;
3. timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Rumusan perusakan lingkungan tersebut di atas memberikan pengertian tentang dua hal, yaitu :<sup>22</sup>  
-pertama : Bahwa perusakan lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya perubahan sifat fisik lingkungan dan/atau sifat hayati lingkungan. Untuk dapat mengetahui telah terjadinya perusakan lingkungan perlu diketahui keadaan lingkungan sebelum terjadinya kerusakan. Dengan perkataan lain, perlu diketahui kondisi awal lingkungan. Di samping itu diperlukan pula suatu kriteria untuk menentukan telah

---

22. Niniek Suparni. Ibid hal 138.

terjadinya perubahan sifat fisik dan sifat hayati lingkungan, sehingga perubahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kerusakan lingkungan.

-kedua : Perlu ditetapkan suatu tolok ukur berupa kriteria untuk menentukan bahwa lingkungan berada dalam kondisi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Dalam bentuk positif dapat dikatakan perlu ditetapkan suatu kriteria untuk menentukan bahwa kondisi lingkungan masih mampu menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Dengan demikian esensialia pencemaran dan atau kerusakan lingkungan itu meliputi unsur-unsur :

1. baik pencemaran maupun kerusakan lingkungan, adalah aktivitas yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan;
2. baik pencemaran maupun kerusakan lingkungan adalah aktivitas yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan, sehingga lingkungan kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
3. dikaitkan dengan perumusan ketentuan pasal 35 UU No.23 Tahun 1997 (UUPLH), pengertian keduanya (pencemaran atau kerusakan) tidak mengandung perbedaan tanggung jawab yuridis bagi pelakunya.
4. tanggung jawab yuridis tersebut, berhubungan erat

dengan aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan. Jadi disini tidak dipermasalahkan pencemaran atau kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas yang bersifat alamiah.

### C. Sengketa Lingkungan Hidup Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

#### C.1. Sengketa Lingkungan Hidup

Saat ini di Indonesia, norma hukum lingkungan yang menjadi landasan operasional pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang diundangkan pada tanggal 19 September 1997. UUPLH ini merupakan penyempurnaan dari UULH (UU No.4 Tahun 1982). Dari sudut perundang-undangan, UU No.23 Tahun 1997 memberikan harapan yang lebih besar bagi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, karena UU ini terlihat lebih progresif termasuk pengaturan yang menyangkut penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut diharapkan akan meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap sistem nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup di masa depan. Untuk itu pemahaman tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup perlu diperdalam dan dikembangkan pada semua

pihak, baik terhadap instansi-instansi yang terkait maupun pada masyarakat luas.

Timbulnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dapat berkembang menjadi sengketa lingkungan, apabila salah satu pihak penderita atau korban merasa dirugikan karena adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari suatu kegiatan oleh siapapun baik dengan sengaja maupun tidak. Di dalam UULH (UU No.4 Tahun 1982) tidak dicantumkan tentang pengertian sengketa lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal 1 ayat (19) UULH, sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, sumber sengketa lingkungan adalah peristiwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

Sengketa lingkungan hidup meliputi sengketa baik sebelum maupun sesudah sengketa menjadi perkara di pengadilan. Menurut Abdul Hakim GN timbulnya sengketa lingkungan hidup dikarenakan adanya beberapa faktor, yaitu :<sup>23</sup>

1. Adanya kegiatan manusia yang menimbulkan dampak negatif pada lingkungan yang menyebabkan lingkungan

---

23. Abdul Hakim GN. 1989. Sengketa Lingkungan dan Masalah Beban Pembuktian. Majalah Hukum & Pembangunan UI. hal 56-57.

menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya, sehingga sejumlah manusia merasa dirugikan.

2. Adanya kegiatan manusia yang menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sehingga lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan, sehingga masyarakat dan negara dirugikan.
3. Adanya kebijaksanaan publik yang berkenaan dengan lokasi sumber yang dilakukan tanpa mengindahkan daya dukung lingkungan sehingga menimbulkan kerugian pada masyarakat dan lingkungan hidupnya yang pada suatu saat dapat menimbulkan sengketa.
4. Adanya keputusan.....
5. Adanya sikap pejabat ....

Masa yang terlibat dalam suatu sengketa lingkungan itu bukan hanya satu orang, tetapi juga lingkungan itu sendiri, baik lingkungan sebagai satu ekosistem maupun sebagai sumber daya alam. Yang menjadi korban dalam pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan bukan hanya orang, melainkan juga lingkungan itu sendiri. Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan merupakan hasil interaksi (negatif) antara orang dengan lingkungannya. Selain itu timbulnya masalah lingkungan itu dapat merupakan hasil kumulatif dari berbagai orang atau kegiatan . 24

#### C.2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 30 ayat (1) UUPH "Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan

---

24. Mustadji. 1991. *Penindakan Pelanggaran Hukum Lingkungan*. Prosidings Lokakarya. hal 70.

secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa sengketa lingkungan dapat diselesaikan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

#### C.2.1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Seperti diketahui bahwa di Indonesia berdasarkan pasal 10 UU No.14 Tahun 1970, terdapat empat lingkungan peradilan dengan Mahkamah Agung sebagai puncaknya. Keempat lingkungan peradilan tersebut ialah :

1. Lingkungan Peradilan Umum;
2. Lingkungan Peradilan Agama;
3. Lingkungan Peradilan Militer; dan
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai instrumentarium juridis bagi pengelolaan lingkungan hidup; hukum lingkungan harus menjadi suatu bidang ilmu hukum yang akrab dengan dunia peradilan tersebut terutama Peradilan Umum (Perdata dan Pidana), maupun Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan perannya sebagai lembaga judicial control tersebut di atas.<sup>25</sup>

Sejauh ini prosedur pemenuhan gugatan dan atau

---

25. Paulus Effendi Lotulung. 1994. Peran Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Jurnal Hukum Lingkungan No.54 Tahun I No.1 Tahun 1994.



tuntutan hukum dalam sengketa lingkungan belum ditentukan dalam suatu peraturan hukum perundang-undangan, maka gugatan dan atau tuntutan hukum diajukan melalui mekanisme Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>26</sup> Dasar Hukum peradilan umum tersebut adalah Undang-Undang No.2 Tahun 1986. Adapun dasar hukum Peradilan Tata Usaha Negara adalah UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Aspek hukum perdata, aspek hukum pidana dan tata usaha negara (administrasi) merupakan sarana dalam menyelesaikan terjadinya sengketa lingkungan melalui pengadilan disamping penyelesaian di luar pengadilan.

#### C.2.1.1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dengan Hukum Administrasi (Sanksi Administrasi).

Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumen yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Menurut Siti Sundari Rangkuti, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit

---

26. Komar Kartaatmadja. 1981. *Gantirugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*. Bandung : Alumni. hal 127.

yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. Penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang itu.<sup>27</sup>

Di dalam UUPLH penegakan hukum administrasi terdiri atas dua macam wewenang pemerintah yaitu wewenang pengawasan dan wewenang penerapan sanksi (administrasi). Mengenai wewenang pengawasan diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 24, sedangkan tentang penerapan sanksi administrasi diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 27 UUPLH dan pada bagian keempat tentang Audit Lingkungan Hidup. Sanksi administrasi merupakan ketentuan baru yang dimasukkan dalam UUPLH.

Jenis-jenis sanksi administrasi dalam UUPLH dapat diketahui dari beberapa pasal berikut ini :

Pasal 25 :

- (1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berda-

---

27. Siti Sundari Rangkuti. 1991. Inovasi Hukum Lingkungan : Dari Ius Constitutum ke Ius Constitutivendum. Pidato Pengukuhan dihadapan Senat Universitas Airlangga.

sarkan undang-undang.

- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota/madya/Kepala Daerah Tingkat I) dengan peraturan Daerah Tingkat I.
- (3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pasal 27 :

- (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Dari isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui, bahwa ada 3 jenis sanksi administrasi dalam UUPLH, yaitu :

1. Paksaan pemerintahan : Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
2. Uang paksa : Pasal 25 ayat (5).
3. Pencabutan izin (usaha dan/atau kegiatan) : Pasal 27.

Dalam hukum administrasi, paksaan pemerintahan berbentuk tindakan atau perbuatan nyata (*feitelijk handel-*

ing) yang dalam kepustakaan hukum Belanda lazim dikenal sebagai "*bestuursdwang*".<sup>28</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) UUPH, paksaan pemerintahan dapat berupa :

- tindakan untuk mencegah pelanggaran;
- tindakan untuk mengakhiri pelanggaran;
- tindakan menanggulangi akibat yang ditimbulkan;
- tindakan penyelamatan;
- tindakan pemulihan.

Semua tindakan tersebut atas beban biaya penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.

Berdasarkan pasal 25 UUPH yang antara lain berbunyi : "tindakan penyelamatan penanguhan dan/atau pemulihan.. dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu". Bunyi ketentuan tersebut merupakan alternatif terhadap bentuk sanksi administrasi yang pertama berupa paksaan pemerintahan. Dalam hukum administrasi Belanda hal tersebut dinamakan "*dwangsom*".<sup>29</sup>

Bentuk sanksi administrasi tertinggi adalah pencabutan izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Dalam

---

28. Philipus Mandiri Hadjon. 1998. UU No.23 Tahun 1997 Dan Penegakan Hukumnya Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kajian Sosialisasi Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang 21 Pebruari 1998.

29. Philipus Mandiri Hadjon. Ibid hal 10.

UUPLH ketentuan sanksi administrasi berupa pencabutan izin diatur dalam pasal 27.

Dari ketentuan yang ada, pejabat yang berwenang untuk menerapkan sanksi administrasi adalah :<sup>30</sup>

- Paksaan pemerintahan merupakan wewenang Gubernur KDH Tingkat I. Wewenang Gubernur KDH Tingkat I dalam hal ini merupakan tugas pembantuan (*medebewind*). Dengan demikian pemerintah pusat pun berwenang menerapkan paksaan pemerintahan dalam hal Kepala Daerah tidak mampu atau lamban.
- Penetapan uang paksa, dalam ketentuan tidak disebutkan secara tegas siapa yang berwenang. Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) UUPLH dapat disimpulkan bahwa wewenang tersebut ada pada Gubernur KDH Tingkat I, namun dalam ayat ini bentuk tindakannya berbeda dan prosedurnya pun berbeda maka wewenang penetapan uang paksa masih perlu diatur bersama-sama dengan prosedurnya. Selama belum diatur, berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa selama belum diatur dapat menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama menyangkut upaya penagihannya. Penetapan uang paksa dilakukan oleh pejabat pemerin-

---

30. Philipus Mandiri Hadjon. Ibid.hal 11.

tah dan penagihannya dapat menggunakan prosedur hukum acara perdata dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak mau membayar secara suka rela.

- Pencabutan izin, merupakan wewenang pejabat yang menerbitkan izin tersebut. Dalam hukum administrasi ketentuan semacam ini berdasarkan pada asas "*contrarius actus*"

Di dalam penerapan sanksi administrasi tidak ada satu prosedur tunggal untuk menerapkannya. Dalam hukum administrasi, prosedur diawali dengan prakarsa dan selanjutnya adalah langkah formal dari pejabat yang berwenang untuk menerapkan sanksi administrasi.

Dalam menerapkan sanksi administrasi, prakarsa penerapan sanksi pertama-tama bisa dari pihak pejabat yang berwenang menerapkan sanksi, bisa dari pejabat yang berwenang melakukan pengawasan dan bisa dari masyarakat. Dalam UUPH, kemungkinan prakarsa dari masyarakat untuk meminta penerapan sanksi administrasi diatur dalam pasal 25 ayat (3) dan pasal 27 ayat (3). Khusus mengenai pencabutan izin, prakarsa datang dari KDH (pasal 27 ayat (2)).

Untuk langkah formalnya ketiga jenis sanksi administrasi tersebut masing-masing menempuh langkah formal tersendiri. Dalam UUPH hanya diatur secara sumir

langkah formal untuk penerapan sanksi berupa pelaksanaan pemerintahan, yaitu adanya surat perintah yang mendahului penerapan sanksi berupa paksaan pemerintahan. Prosedur penetapan uang paksa belum diatur dan prosedur pencabutan izin diatur dalam masing-masing ketentuan perizinan. Khusus mengenai surat perintah yang mendahului paksaan pemerintahan akan terkait erat dengan ketentuan UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Surat perintah tersebut merupakan suatu bentuk keputusan tata usaha negara (KTUN). Dengan demikian dapat diuji keabsahannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penegakan hukum administrasi merupakan tindakan pertama atau langkah pertama yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam pengelolaan lingkungan, untuk itu penegakan hukum administrasi dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup hendaknya didayagunakan secara optimal agar tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dapat tercapai.

#### C.2.1.2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengan Hukum Perdata (Sanksi Perdata)

Dalam UUPLH, mengenai aspek hukum perdata banyak penambahannya, yaitu yang meliputi permasalahan :<sup>31</sup>

- a. Gugatan ganti rugi dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).
- b. Pengakuan "*ius standi*" pada organisasi lingkungan.
- c. Gugatan perwakilan yang diajukan oleh masyarakat (*class-actions*).

Pasal 34 mengatur ketentuan tentang dibukanya kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan atas kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Adapun bunyi pasal 34 adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa ayat (1)

---

31. Paulus Effendi Lotulung. 1998. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam UU No.23 Tahun 1997 Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. Makalah disampaikan pada Seminar nasional Kajian dan Sosialisasi Undang-Undang no.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan



dari pasal 34 ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :<sup>32</sup>

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolah limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Penjelasan dari ayat (2) pasal 34 adalah bahwa pembebanan pembayaran uang paksa atau setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), dalam UUPLH diatur dalam pasal 35, yaitu sebagai berikut :

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan,

...Continued...

Hidup. Diselenggarakan oleh Fakultas hukum Universitas Diponegoro. Semarang 21 Pebruari 1998. hal2.

dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini :
- a. adanya bencana alam atau peperangan, atau
  - b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau
  - c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Dari bunyi pasal 35 tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab mutlak dapat diterapkan untuk hal-hal sebagai berikut :

- usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
- menggunakan bahan berbahaya dan beracun.
- dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya atau beracun.

...Continued...

Di dalam penjelasan ayat (1) pasal 35 tersebut dikatakan bahwa pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.<sup>32</sup> Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.<sup>33</sup>

Disamping UU No.23 Tahun 1997, asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) juga diatur di dalam UU No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Wkslusif (ZEE). Dalam UU No.5 Tahun 1983 tentang ZEE tanggung jawab mutlak dibatasi dengan ganti kerugian maksimum. Konsep tanggung jawab mutlak dalam UU No.5 Tahun 1983 lebih ditekankan pada aspek perlindungan media lingkungan tertentu, yakni lingkungan laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif

---

32. Koesnadi Hardjasoemantri. Opcit hal 5.

33. Koesnadi Hardjasoemantri. 1998. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Makalah. Semarang : Yayasan Jamas. hal 5.

Indonesia terhadap semua kegiatan dan jenis zat yang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan. Jadi tidak dikaitkan dengan jenis kegiatan atau zat-zat tertentu.

Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC)* berdasarkan Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978. Dalam *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*, 1969 tersebut diatur masalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan sebagaimana lazimnya berlaku, maka juga dalam hal ini dikecualikan hal-hal tertentu yaitu yang membebaskan pemilik kapal dari kewajiban membayar ganti rugi yaitu dalam hal :<sup>34</sup>

- a. Jika kecelakaan timbul karena perang, persengketaan bersenjata, perang saudara, pemberontakan atau bencana alam yang tidak mungkin dapat dihindarkan.
- b. Jika kecelakaan diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga dengan maksud untuk menimbulkan kerugian tersebut.
- c. Jika kecelakaan ditimbulkan oleh perbuatan atau kelalaian dari korban sendiri. Dalam hal ini dimaksudkan untuk dapat dicakup 2 kemungkinan, yaitu :
  - kecelakaan disebabkan karena perbuatan atau kelalaian dari negara pantai yang bertanggungjawab terhadap terpeliharanya mercu suar dan alat-alat navigasi lain;
  - jika pemilik kapal dapat membuktikan bahwa kecelakaan timbul karena perbuatan atau kelalaian oleh pihak yang menderita kerugian sendiri.

Dari uraian di atas diketahui bahwa sistem tanggung jawab mutlak (*strict liability*) mempunyai kekhususan

---

34. Komar Kartaatmadja. *Ganti rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*. Bandung : Alumni. 1981. hal 74.

dibanding dengan sistem tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Pembuktian akan menjadi lebih sederhana dan relatif lebih pendek pada tanggung jawab mutlak (*strict liability*), suatu hal yang tidak jarang merupakan faktor penyulit dalam proses klaim ganti rugi umum. Demikian maka jelaslah bahwa prinsip umum yang diikuti dalam ganti rugi pencemaran laut adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dengan kemungkinan penggunaan prinsip ganti rugi umum secara penuh (*absolute liability*) sebagai pengecualian.

Dengan telah diratifikasinya *CLC* tersebut berarti pemilik kapal angkutan laut berkebangsaan Indonesia dalam menjalankan usahanya tunduk pada tanggung jawab mutlak berdasarkan *CLC*. Aspek positif dari ratifikasi ini adalah Indonesia relatif terlindungi dari ancaman terjadinya kerugian akibat pencemaran laut.

Tanggung jawab mutlak yang dicantumkan dalam pasal 35 merupakan perlindungan hukum terhadap korban pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dengan diterapkannya ajaran tanggung jawab mutlak, maka tidak perlu lagi dilihat atau dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si pelaku pencemaran atau kerusakan untuk mengharuskan membayar ganti rugi. Dengan demikian, meskipun korban awam dalam permasalahan yang dihadapi

tetap akan mendapatkan haknya karena korban tidak perlu membuktikan kesalahan pelaku. Dalam hal ini adanya resiko menjadi dasar utama bagi kewajiban si pelaku kegiatan untuk memberikan kompensasi, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesalahan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan asas "si pencemar membayar" (*polluter pays*) dalam Hukum Lingkungan.<sup>35</sup>

Manfaat lain dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak dalam perundang-undangan lingkungan adalah untuk mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk memperhatikan dan memperhitungkan biaya sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya.

Aspek hukum perdata yang tercakup di dalam ketentuan UU No.23 Tahun 1997 selanjutnya adalah pengakuan "*ius standi*" pada organisasi lingkungan. Pengertian "*ius standi*" tersebut diartikan secara umum sebagai hak atau kualitas untuk tampil dan bertindak sebagai penggugat dalam hukum di pengadilan (*persona standi in iudicio*).<sup>36</sup>

Dalam UULH, pengakuan "*ius standi*" belum disebutkan secara eksplisit dalam pasal-pasalannya, sehingga dalam praktek operasionalnya undang-undang tersebut juga

---

35. Paulus Effendie Lotulung. Opcit hal 6.

36. Paulus Effendi Lotulung. Opcit hal 9.

masih menimbulkan kendala. Selanjutnya UUPLH menerima dan mengakomodasi pengakuan "*ius standi*" tersebut dalam pasal 38 dan pasal 39 .

UUPLH secara eksplisit tidak memperkenankan organisasi yang bertindak sebagai penggugat untuk menuntut ganti kerugian berwujud finansial atau moneter, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Dengan demikian terbuka kemungkinan bagi organisasi lingkungan untuk menuntut ganti rugi sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh organisasi tersebut, tapi bukan ganti kerugian yang mengatas namakan kepentingan orang banyak atau lingkungan, misalnya biaya pemulihan lingkungan (*ecological damages*).

Bentuk perlindungan hukum aspek perdata yang lain dalam UUPLH terhadap perikehidupan masyarakat dan lingkungan hidup adalah diterapkannya "gugatan perwakilan" oleh masyarakat atau *class action* yang dalam undang-undang ini dicantumkan dalam pasal 37. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah

yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari bunyi penjelasan ayat (1) pasal ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hal mengajukan gugatan perwakilan adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Unsur perlindungan terhadap perikehidupan masyarakat dan lingkungan hidup sangat jelas disini. Dalam ayat 1 pasal tersebut ditentukan bahwa masyarakat yang diwakili oleh kelompok kecil masyarakat berhak untuk :

- a. mengajukan gugatan ke pengadilan dan/atau
- b. melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.

#### **C.2.1.3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Hukum Pidana (Sanksi Pidana)**

UUPLH memuat ketentuan pidana secara rinci, yaitu antara lain mengenai berbagai ketentuan tentang penggunaan sanksi pidana. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan penegakan hukumnya dibanding dengan ketentuan pidana yang ada dalam UULH



Dalam penyelesaian sengketa lingkungan, penggunaan sanksi pidana merupakan alternatif terakhir jika instrumen hukum lain sudah tidak dapat mengatasinya lagi. Hal ini dikarenakan mengacu pada asas yang menyatakan bahwa hukum pidana bersifat subsidair atau *ultimum remedium*, sehingga penggunaannya harus merupakan obat terakhir.

Di dalam UUPH ketentuan pidana diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 48.

Pasal 41 mengatur sebagai berikut :

- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42 UUPH mengatur apabila ada kealpaan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Barang siapa yang karena alpanya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh

ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42 UUPLH mengatur apabila ada kealpaan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Barang siapa yang karena alpanya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 43 :

- (1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)

tahun dan denda paling banyak Rp.450.000.000,-  
(empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 43 ayat (1) mengandung delik formil yang memudahkan pembuktian, karena pencemaran dikaitkan dengan pembuangan limbah yang melampaui ambang batas efluen (Hardjosoemantri, 1998 : 7).

Pasal 44 UUPH memuat ketentuan mengenai delik yang sama dengan pasal 43 hanya saja dilakukan dengan kealpaan. Pasal 45 UUPH dikaitkan dengan tanggung jawab hukum (corporate liability), yaitu apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, maka ancaman pidananya diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46 ayat (1) UUPH menyatakan bahwa apabila ada tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 45, maka tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud pada pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

Ayat (2) pasal 46 UUPH menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun

berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, maka tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama. Ayat (4) pasal ini berkaitan dengan keharusan pengurus menghadapi sendiri di pengadilan, meskipun pada saat penuntutan diwakili bukan pengurus.

Pasal 47 UUPH menyatakan sebagai berikut :

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, dan/atau
- c. perbaikan akibat tindak pidana, dan/atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
- e. meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan/atau
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Mengenai ketentuan pidana ini perlu diperhatikan penjelasan umum UUPH yang menyatakan bahwa sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabi-

la sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

#### C.2.2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan yang disebut juga dengan *ADR (Alternative Dispute Resolution)* merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat menang-menang (*win-win*). Yang dimaksudkan solusi "menang-menang" disini adalah solusi atau kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut (*shared interest*). 37

*ADR* sangat relevan dikembangkan dalam penyelesaian konflik-konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam maupun pencemaran industri. Penerapan *ADR* dalam konflik lingkungan lebih tepat didayagunakan karena sifatnya

---

37. Mas Achmad Santosa. 1998. UU No.23 Tahun 1997 Ditinjau Dari Aspek Feasibilitas Penerapan Alternative Dispute Resolution. Makalah pada Seminar Nasional Lingkungan. Universitas Diponegoro Semarang. Semarang, 21 Pebruari 1998. hal 1.

yang lintas sektoral dan bukan merupakan urusan semata-mata (eksklusif) pemerintah, serta penyelesaiannya hampir dapat dikatakan tidak dapat diselesaikan secara "menang kalah", namun bersifat jangka panjang, terkoordinasi antar institusi terkait, partisipatoris, dan oleh karenanya lebih tepat diselesaikan melalui cara *join problem solving* yang melibatkan seluruh *stakeholders*.

Terdapat 4 (empat) pasal 30,31,32,33 yang mengatur ADR dalam UU No.23 Tahun 1997 . Pasal-pasal tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip umum ADR yang menjadi pegangan masyarakat dan pemerintah untuk menerapkan ADR dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Dari keempat pasal tersebut, dapat disimpulkan berbagai prinsip umum sebagai berikut :<sup>38</sup>

- ADR yang dikenal dalam UU No.23 Tahun 1997 merupakan ADR dalam konteks penyelesaian sengketa (sengketa telah muncul/*after the fact*).
- ADR bersifat sukarela dan pilihan (*voluntary* dan *optional*).
- ADR tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana lingkungan.
- ADR tidak dapat diberlakukan secara simultan dengan

---

38. Mas Achmad Santosa. Ibid. hal 3.

proses penyelesaian di pengadilan untuk lainnya seperti pengendalian dampak lingkungan.

- Pilihan forum ADR dapat berbentuk negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun bentuk-bentuk lainnya yang merupakan pengembangan dari ketiga bentuk tersebut.
- Keberadaan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Di dalam tahap Pelita VI, memasuki era PJP II, masalah-masalah lingkungan mulai menampilkan gejala yang semakin kompleks dan sulit untuk ditanggulangi. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam Repelita VI yang diproyeksikan 6,2% pertahun dan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi berpotensi terhadap kemerosotan jumlah dan mutu maupun kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Fakta yang dikemukakan dan dimuat dalam berbagai laporan resmi menunjukkan bahwa pada Pelita VI sektor non migas telah mulai menggeser peranan sektor andalan dalam Repelita VI dan Repelita-Repelita selanjutnya. Dalam Repelita VI, laju pertumbuhan sektor ini diproyeksikan sebesar 10,6% pertahun. Kecenderungan tersebut tentu saja terkait dengan tingginya penggunaan sumber daya alam seperti air, bahan tambang atau mineral, serta flora dan fauna yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup.



Demikian juga tingginya rata-rata laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian non migas sebesar 8,9% pertahun dapat mempercepat proses kerusakan lahan dalam waktu yang relatif singkat dan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Apabila kegiatan penambangan terbuka (*open pit*) dilakukan di daerah resapan air maka akan mengakibatkan terganggunya sistem tata air pada kawasan yang mungkin jauh lebih luas dari kawasan tambang itu sendiri.

Di sektor industri, laju industrialisasi akan tetap tinggi dalam Repelita VI dan masih akan terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan sekitarnya. Apabila melihat peningkatan jumlah penduduk di perkotaan dari sekitar 30,9% menjadi 40,3% pada Repelita VI, maka hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan perkotaan berupa pencemaran air, udara, serta peningkatan sampah kota.

Apabila tidak terdapat kebijakan penyebaran industri ke Pulau Jawa, maka jumlah emisi total yang ada sekarang di Pulau Jawa akan meningkat 6 kali lipat pada tahun 2010. Diperkirakan juga apabila tidak terdapat kebijaksanaan nyata untuk mengatasi keadaan ini, pada tahun 2010 sekitar 85% dari korban akan mengalami infeksi saluran pernapasan (*inflammation of respiratory tract*) di Pulau Jawa, dan akan melanda sekitar 15% di

luar Jawa, khususnya di Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Bali.

Data penting lainnya yang perlu dikaji adalah data Bank Dunia yang memprediksikan perkembangan industri di tahun 2000'an yang bakal mengalami perubahan yang cukup substansial. Apabila pada tahun 1990, total hasil produksi sektor industri di luar Jawa sebesar 25 , maka pada tahun 2010 diprediksikan akan meningkat menjadi 35%. Di luar Jawa diperkirakan akan didominasi oleh jenis industri pengolahan (*processing industry*) yang lebih bersifat padat polusi (*heavily polluted*). Sedangkan di Pulau Jawa akan menjadi tempat industri perakitan (*assembly industry*), yang relatif lebih bersih. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa di tahun 2000 diperkirakan total jumlah partikulat (debu) yang dihasilkan di luar Pulau Jawa akan melebihi total jumlah partikulat yang ada di Pulau Jawa. Demikian juga pada tahun 2010, jumlah pencemaran BOD di luar Jawa akan sama dengan di pulau Jawa.

Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat dan DKI Jakarta juga terancam oleh bahaya limbah berbahaya dan beracun (limbah B-3). Studi yang dilakukan oleh *Dames & Moore, Inc.*, di tahun 1993 memberikan estimasi dimana Jawa Barat dan DKI Jakarta saat ini menghasilkan 2,2 juta ton limbah B-3 pertahun. Bahaya limbah B-3 terse-

but tidak hanya berbahaya terhadap kesehatan manusia, namun juga membutuhkan biaya pemulihan yang sangat mahal. Demikian data yang diperoleh dari *Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)*.<sup>1</sup>

Pada tahun 1997 dan tahun-tahun kedepan, seluruh bangsa di dunia akan mempersiapkan diri memasuki era perdagangan bebas. Paling sedikit terdapat 3(tiga) permasalahan utama yang berkaitan dengan keterkaitan antara perdagangan bebas dengan lingkungan hidup yaitu :<sup>2</sup>

- A. Potensi berkurangnya daya saing dan hilangnya pasar bagi pengekspor yang berasal dari negara-negara berkembang khususnya pengekspor berskala kecil karena harus menyesuaikan dengan persyaratan-persyaratan lingkungan yang diterapkan oleh negara industri maju;
- B. Relokasi industri dari negara maju ke negara berkembang (*industrial flight*);
- C. Penggunaan isu perdagangan bebas dari pemodal untuk menekan Pemerintah agar mengenyampingkan atau melonggarkan kewajiban-kewajiban lingkungan (*environ-*

---

1 Efektifitas Kebijakan, Penegakan Hukum & Penataan Lingkungan 1996. Buletin Informasi Hukum Dan Advokasi Lingkungan No.06/1997. hal 2.

2. Buletin Informasi Hukum Dan Advokasi Lingkungan No.06/1997. Indonesian Center For environmental Law (ICEL). hal 3.

*mental investment vs reducing cost to increase competitiveness).*

Isyu-isyu (B) dan (C) lebih menyangkut ancaman terhadap rakyat yang memiliki posisi relatif lemah sehingga advokasi terhadap kedua aspek ini tidak memiliki gaung dibandingkan isyu A.

Persoalan penegakan hukum dan penataan lingkungan adalah salah satu isu penting yang selalu dibahas, apabila kita berbicara mengenai kondisi dan status dari lingkungan hidup Indonesia. Lemahnya penegakan hukum, membuat para pencemar bukan hanya sekedar tenang-tenang saja akan tetapi kian tidak peduli dalam melakukan tindakan-tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan. Kendatipun pemerintah telah menyediakan berbagai insentif, disintensif dan fasilitas gerak kesukarelaan penataan lingkungan itu seakan makin tertatih. Kondisi tersebut di atas setidaknya-tidaknya tergambar dari jumlah kasus lingkungan dalam tabel berikut ini.

TABEL I  
JUMLAH KASUS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 1996

! NO !	MEDIA/JENIS	! JUMLAH KASUS !
! 1 !	Kebisingan	! 3 !
! 2 !	Flora & Fauna	! 14 !
! 3 !	Hutan	! 37 !
! 4 !	Laut	! 11 !
! 5 !	Sampah	! 3 !
! 6 !	Tambang	! 29 !
! 7 !	Tanah	! 5 !
! 8 !	Udara	! 30 !
! 9 !	Air	! 73 !
! !	J U M L A H	! 205 !

Sumber : Indonesian Center For Environmental Law  
(ICEL) 1997

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa kasus lingkungan dengan media air berada pada urutan teratas, kemudian hutan diurutan kedua dan udara pada urutan ketiga .

Dalam menghadapi masalah tersebut, Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengantisipasinya. Seperti dari mulai perangkat hukum sampai dengan suatu badan yang khusus untuk monitoring pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kesemuanya merupakan aset untuk bertanggung jawab (Pemerintah, Masyarakat dan Industrialis) dalam menanggulangi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya tabel berikut ini dapat menunjukkan penanganan (model penyelesaian) yang telah

dilakukan pada kasus lingkungan tersebut.

TABEL II  
MODEL PENYELESAIAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 1996

! NO !	! MEDIA/JENIS !	! JML !	! MODEL PENYELESAIAN !			
			! ADM !	! PDT !	! PDN !	! ADR !
! 1 !	! Kebisingan !	! 3 !	! 3 !	! - !	! - !	! - !
! 2 !	! Flora&Fauna !	! 14 !	! - !	! - !	! 3 !	! - !
! 3 !	! Hutan !	! 37 !	! 20 !	! - !	! 1 !	! - !
! 4 !	! Laut !	! 11 !	! - !	! - !	! - !	! - !
! 5 !	! Sampah !	! 3 !	! - !	! - !	! - !	! - !
! 6 !	! Tambang !	! 29 !	! 25 !	! 2 !	! 1 !	! - !
! 7 !	! Tanah !	! 5 !	! 2 !	! - !	! - !	! 1 !
! 8 !	! Udara !	! 30 !	! 4 !	! - !	! - !	! 4 !
! 9 !	! Air !	! 73 !	! 36 !	! 3 !	! 3 !	! 5 !
! J U M L A H !		! 205 !	! 90 !	! 5 !	! 8 !	! 10 !

Sumber : Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) 1997.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penyelesaian terhadap kasus lingkungan yang terbanyak adalah dengan penyelesaian administratif kemudian ADR (musyawarah) selanjutnya pidana dan perdata. Namun demikian dengan melihat jumlah kasus yang ada nampak disini bahwa masih banyak kasus yang belum/tidak jelas bagaimana penyelesaiannya.

Aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata, aspek hukum pidana dan ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) merupakan sarana dalam menyelesaikan terjadinya sengketa

ta lingkungan. Aspek hukum yang berkaitan dengan problema lingkungan hidup tersebut semakin terasa penting penegakannya dalam masyarakat sebagai salah satu sarana untuk mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup yang baik.

**B. PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY)  
DALAM KASUS LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN NEGERI**

Aspirasi bangsa dalam Pembangunan Nasional Jangka Panjang Kedua menghendaki diwujudkannya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara berlanjut, hal ini mengandung pengertian dalam Pembangunan Nasional tidak hanya tertuju pada aspek atau proses membangun saja, tetapi juga terkandung tuntutan untuk mempunyai suatu kemampuan mengendalikan dan mengantisipasi berbagai risiko dalam aktivitas pembangunan salah satunya melalui pengembangan segi hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan ini meliputi, aspek pidana,perdata,tata usaha negara maupun hukum internasional dan cabang-cabang ilmu hukum yang terkait lainnya. Masalah lingkungan hidup haruslah ditangani secara integral meliputi berbagai bidang yang saling berkait dalam masyarakat, apabila kita inginkan bahwa kebijakan (*policy*) dan komitmen kita tentang pelestarian lingkungan hidup itu dapat terlaksana dan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Dalam rangkaian penanganan secara

integral itu, salah satu mata rantai dalam segi penegakan hukumnya adalah fungsi pengadilan yang bertindak secara represif dan mempunyai peran sebagai "*judicial control*" dengan segala keterbatasan dan kelebihanannya.<sup>3</sup>

Meskipun dari hasil penelitian yang diperoleh dari data-data penanganan kasus yang dihimpun ICEL menunjukkan bahwa jumlah presentase kasus lingkungan yang tidak terselesaikan ternyata cukup besar yaitu sejumlah 51%. Penggunaan jalur perdata (litigasi perdata) hanyalah 5% dari jumlah yang ada, sedangkan pidana hanyalah 3%. Hal ini dapat diindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dalam menyelesaikan kasus lingkungan masih sangat rendah dan belum menunjukkan presentase yang meningkat.<sup>4</sup> Namun demikian permasalahan berupa kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terus meningkat sebagaimana digambarkan dalam tabel I diatas, merupakan permasalahan rumit yang memang harus dihadapi.

Penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagai aspek hukum perdata dalam Sistem Hukum

---

3. Paulus Effendi Lotulung. 1994. Peran Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Jurnal Hukum Lingkungan No.56 Tahun I No.1/1994. hal 55.

4. Buletin Informasi. Opcit . hal 5.



Lingkungan merupakan tuntutan kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Misi pengelolaan lingkungan hidup yang diamanatkan dalam Undang-undang No.4 Tahun 1982 maupun UU No.23 Tahun 1997 menuntut dilakukannya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, dengan diaturnya tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kedua peraturan tersebut sebagai salah satu kesepakatan dalam *Deklarasi Stockholm* Tahun 1972 menuntut agar pelaksanaan hukum dari asas tanggung jawab mutlak tersebut perlu untuk dioptimalisasikan atau didinamisasikan sehingga mampu menunjukkan efektivitas hukumnya.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 19 Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), sengketa lingkungan hidup adalah penyelesaian antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan timbul karena masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tersebut tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya

---

5. Daud Silalahi. 1996. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Edisi Revisi. Bandung : Alumni. hal 129-132.

(periksa pasal 1 ayat (12) UUPH), misalnya sebuah sungai yang ditetapkan melalui SK Gubernur sebagai golongan B (untuk air minum) yang kemudian dicemari oleh limbah perusahaan kertas atau tekstil dan berakibat kualitas sungai tersebut turun, sehingga tidak dapat berfungsi lagi sebagai bahan baku air minum (sesuai peruntukannya). Sedangkan kerusakan lingkungan timbul karena tindakan yang menimbulkan kerusakan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (periksa pasal 1 ayat (14) UUPH). Misalnya sebuah perusahaan di wilayah pantai melaksanakan reklamasi pantai sehingga berakibat hancurnya dan hilangnya tambak-tambak disekitar pabrik.

Selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam UUPH memberikan alternatif pilihan yakni melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 30, yaitu sebagai berikut :

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa

ta lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Menurut Penjelasan pasal 30 ayat (1), dibebaskannya pilihan untuk penyelesaian sengketa adalah ditujukan untuk melindungi hak keperdataan dari para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, Penjelasan pasal 30 ayat (3) menegaskan bahwa cara penyelesaian sengketa yang ber-tingkat ini adalah untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 30 tersebut maka dapat dimungkinkan secara langsung mengajukan gugatan ganti rugi di luar pengadilan atau melalui pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 sampai dengan pasal 39.

Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tersebut merupakan prinsip pertanggungjawaban hukum (*liability*) yang telah berkembang sejak lama yakni berawal dari sebuah kasus di Inggris (*Rylands v. Fletcher*) pada tahun 1868.<sup>6</sup> Menurut teori ini, apabila seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *ultrahazardous* atau

---

6. Mas Achmad Santosa dkk. 1997. Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) di Bidang Lingkungan Hidup. Jakarta : Indonesian Center For Inviromental Law (ICEL). hal 8.

*abnormally dangerous*, maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.

Selanjutnya asas ini diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan Konvensi-konvensi Internasional. Indonesia menundukkan diri untuk menerapkan asas ini sebagai pihak atau peratifikasi dari Konvensi Internasional, yang kemudian secara tegas mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan nasional. Bermula dari UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), UU No.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan UU No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. UU No.4 Tahun 1982 kemudian dirubah dengan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jika kita melihat UULH 1982 sebenarnya muatan asas tanggung jawab mutlak sudah diakomodir yaitu di dalam Pasal 21 yang berbunyi :

"Dalam berbagai kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu, tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar, pada saat terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan."

Dalam penjelasannya disebutkan lebih jauh bahwa

tanggung jawab mutlak akan dikenakan secara selektif atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud.

Kendatipun asas *strict liability* dalam UU No.4 Tahun 1982 telah diakomodir tetapi ternyata untuk menerapkan Pasal 21 masih mengandung permasalahan.

Di dalam UU No.4 Tahun 1982, bab VI tentang "Ganti Kerugian dan Biaya Pemulihan", terdapat 2 (dua) pasal; yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan yaitu :

1. Penyelesaian ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan melalui mekanisme suatu TIM (pasal 20);
2. Dasar hukum penerapan asas tanggung jawab mutlak.

Dikarenakan asas tanggung jawab mutlak merupakan pengecualian dari doktrin perbuatan melawan hukum pada umumnya (*lex specialis*) dimana ketentuan umumnya mengacu pada pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum secara umum). Pasal 1365 KUH Perdata tersebut menganut pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan sementara Pasal 21 menganut pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Maka disini Pasal 21 merupakan pasal yang terkucil (*alineaated*) dan bertentangan dengan ketentuan

umumnya (*lex generalis*) sehingga tidak dapat diberlakukan.

Hal ini seringkali menjadi kendala dalam penegakan hukum lingkungan dari aspek perdata, karena banyak kasus-kasus gugatan ganti rugi menjadi tidak tertampung, sedangkan untuk mengajukannya langsung ke Pengadilan Negeri atas dasar pasal 1365 KUH Perdata (BW) masih terdapat adanya dua pendapat dalam praktek pengadilan.<sup>7</sup>

Pertama, sebagian pengadilan berpendapat bahwa gugatan demikian secara prosedural belum dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, selama belum ditempuh terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mekanisme suatu Tim (pasal 20), sehingga gugatan ke pengadilan negeri selalu kandas dan diputus dengan menyatakan tidak dapat diterima (*N.O. atau niet ontvankelijkverklaard*).

Kedua, sebagian pengadilan yang lainnya, menyatakan bahwa gugatan demikian tetap dapat diproses di Pengadilan Negeri melalui pasal 1365 KUH Perdata walaupun peraturan perundang-undangan tentang pembentukan TIM belum dikeluarkan. Argumentasi mereka pasal 21 merupa-

---

7. Paulus Effendi Lotulung. 1998. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam UU No.23 Tahun 1997 Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. Makalah pada Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 21 Pebruari 1998.

kan *lex specialis* di bidang lingkungan, sedangkan pasal 1365 KUH Perdata merupakan *lex generalis* di bidang gugatan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum. Apabila dan selama *lex specialis* belum dapat diterapkan. Maka ketentuan *lex generalis* dapat diterapkan.

Berpijak dari kenyataan tersebut, maka dalam UU No.23 Tahun 1997, dalam BAB VII yang mengatur tentang Penyelesaian sengketa lingkungan hidup, secara alternatif dapat dipilih apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan, dengan ditentukan syaratnya yaitu dalam pasal 30 ayat 3. Dengan demikian dimungkinkan secara langsung mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 34 sampai 39 UU No.23 Tahun 1997.

Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran atau kerusakan lingkungan dalam UU No.23 Tahun 1997 tersebut diwujudkan dengan mencantumkan ketentuan mengenai asas tanggung jawab mutlak di dalam Pasal 35 yang berbunyi :

- "1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah berbahaya dan beracun bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan".
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangku-

tan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh salah satu alasan di bawah ini :

- a. adanya bencana alam atau peperangan, atau
- b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia atau
- c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3. Dalam hal terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Pengertian tanggung jawab secara mutlak atau *strict liability* sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan pasal 35 adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dari gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup (*environmental dedicated fund*).



Sejauh ini prosedur pemenuhan gugatan dan atau tuntutan hukum dalam kasus lingkungan hidup belum ditentukan dalam suatu peraturan perundangan, keadaan ini menjadikan gugatan dan tuntutan hukum atas permasalahan lingkungan diajukan melalui mekanisme Peradilan Umum dan atau Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>8</sup>

Dengan demikian maka untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan asas tanggung jawab mutlak dalam kasus lingkungan di Pengadilan Negeri maka dalam penelitian ini kajian dan analisisnya disertai dengan beberapa kasus lingkungan (perdata) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pertama adalah Kasus Kali Babon di Kotamadya Semarang. Kasus Kali Babon merupakan sengketa pencemaran lingkungan akibat limbah buangan pabrik yang akhirnya mencemari sungai tersebut. Penggugat adalah warga yang tinggal disekitar lingkungan sungai Babon di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Adapun Tergugat adalah :

1. PT. Condro Purnomo Cipto ; Industri Penyamakan Kulit.
2. PT. Puspita Abadi ; Industri Penyamakan Kulit.
3. PT. Rodeo ; Industri Tekstil
4. PT. Bintang Buana ; Industri Penyamakan Kulit.

---

8. Koesnadi Hardjasoemantri. Hukum Tata Lingkungan. Edisi Keenam. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. hal 376-388.

5. CV. Sumber Baru : Industri Kertas.
6. Puskud Mina Baruna : Industri Cold Storage.
7. Walikota Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang.

Penggugat sebagai petani tambak memiliki/ menggarap tanah tambak yang terletak di desa Bedono Kecamatan Sayung, Kabupaten demak, sebagai gantungan hidupnya dengan menjual udang dan ikan. Dalam hal ini menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, dimana industri yang dimiliki Para Tergugat membuang limbahnya ke sungai Babon sehingga menyebabkan pencemaran. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata serta UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Hakim Pengadilan Negeri Semarang antara lain Baidawi,SH;Nawizar Anwar, SH;HR. Soetrisno Herrytjahjono, SH, atas dasar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata perihal perbuatan melawan hukum yo Pasal 34 UU No.23 Tahun 1997, dalam Amar Putusannya tanggal 13 Oktober 1998 No.42/Pdt/G/1998/PN Smg, mengabulkan gugatan penggugat atas ganti kerugian akibat pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah buangan pabrik tergugat. Namun kemudian baik Tergugat maupun Penggugat naik banding karena gugatan ganti rugi yang diputuskan hakim tidak

sesuai dengan gugatan ganti rugi yang dituntut Penggugat.<sup>9</sup>

Kedua, kasus Kali Banger di Kotamadya Pekalongan.

Kasus Kali Banger merupakan sengketa lingkungan hidup akibat pencemaran air kali Babon akibat limbah buangan pabrik tekstil yang berlokasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Banger Pekalongan Timur. Penggugat adalah penduduk yang tinggal disekitar kali Banger tersebut yang tergabung dalam Kerukunan Korban Limbah Kali Banger (KKLKB). Tergugat adalah :

1. PT. Kesmatex , pabrik tekstil;
2. CV. Ezritex , pabrik tekstil;
3. PT. Bintang Triputrastex , pabrik tekstil.

Ke tiganya berlokasi di DAS Kali Banger Pekalongan Timur. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan terdiri dari Suprijatman, SH sebagai Ketua Majelis, Edwarman, SH dan Ramli Darasah, SH sebagai hakim-hakim anggota atas dasar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yo Pasal 34 UU NO.23 Tahun 1997, dalam Amar Putusannya tanggal 19 Juli 1999 No.50/Pdt.G/1998.PN.Pkl. mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan ganti rugi Rp.4.800.000,- (empat juta delapanratus riburupiah). Penggugat naik

---

9. Pengadilan Negeri Semarang. Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No.42/PDT.G/1998/PN.Smg Antara Penggugat Muhaimin.C.S. Lawan PT.Condro Purnomo Cipto.C.S.Tanggal Putus 13 Oktober 1998.

banding karena ganti rugi yang diputuskan sangat rendah padahal tuntutan penggugat adalah Rp. 2,822.303.500 (dua miliar delapanratusduapuluh dua juta tigaratusditaribulimaratusrupiah).<sup>10</sup>

Ketiga, kasus PT. Inti Indorayon Utama (PT.IIU).

Penggugat adalah Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Tergugat adalah Perusahaan pulp dan rayon PT. Inti Indorayon Utama, Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM) bersama-sama Gubernur Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri KLH, Menteri Kehutanan. Di dalam keputusannya (Perkara Perdata No.820/PDT.G/1988 PN JKT.PST) para hakim menolak gugatan penggugat. Dalam kasus ini Yayasan WALHI mempersoalkan keabsahan studi Amdal Tergugat PT.IIU, ditutupnya akses penggugat pada informasi AMDAL, dan soal kerusakan dan pencemaran lingkungan.<sup>11</sup>

Keempat, Kasus PT. Sari Morawa.

Kasus yang cukup populer di Indonesia (1997) adalah kasus Masyarakat vs PT.Sari Morawa, yaitu pencemaran yang dilakukan oleh PT. Sari Morawa terhadap sungai Belumai di Medan, Sumatera Utara. Hakim dalam kasus tersebut memutuskan bahwa PT. Sari Morawa tidak bersa-

---

10. Pengadilan Negeri Pekalongan. Turunan Putusan No.50//Pdt.G/1998.PN.Pkl. Tanggal 19 Juli 1999.

11. Sumber Data Jurnal Hukum Lingkungan No.56 Tahun I No.1/1994.

lah dengan menyatakan bahwa bukti yang diajukan tidak memadai.<sup>12</sup>

Kelima, Kasus Muara Jawa Kalimantan. Diawali dengan Total Indonesian Inc sebagai kontraktor yang mendapat izin dari Pemerintah untuk melakukan pemasangan pipa minyak yang beroperasi di wilayah Handil IV Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Dati II Kutai Kalimantan Timur. Pada tahun 1988 proyek tersebut disubkontrakkan kepada PT.Incor Nusantara yang selanjutnya disubkontrakkan lagi kepada PT. Santan Mas DRC. Dalam rangkaian kegiataanya PT. Santan Mas tersebut telah membawa dampak negatif yang sangat merugikan para penduduk di sekitar areal proyek yang sedang dikerjakan, seperti masuknya lumpur ke areal perumahan penduduk, rusaknya jalan-jalan, rusaknya sumur-sumur dan tertutupnya saluran air sehingga mematikan tanaman-tanaman pokok penduduk. Atas kerugian yang ditimbulkan oleh proyek tersebut, penduduk menggugat para pelaksana proyek, termasuk Pemerintah ke Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan tuntutan ganti kerugian sejumlah Rp.977.433.500,-. Namun melalui putusan tertanggal 26 Mei 1990 No.18/Pdt/C1/1989/PN.BPP. Pengadilan Negeri

---

12. Sumber Data Buletin Informasi Hukum Dan Advokasi Lingkungan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia No.01 Tahun V April 1999.

Balikpapan menolak gugatan tersebut. terhadap putusan ini penduduk sebagai Penggugat menyatakan naik banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda.

Ternyata pada tingkat banding di PT.Samarinda, gugatan penduduk sebagian dikabulkan melalui putusan tertanggal 19 Pebruari 1991 No.03/Perd/1991/PT KT SMDA. Melalui putusan itu pula PT.Samarinda membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, sedangkan jumlah ganti kerugian yang dikabulkan adalah sebesar Rp.677.433.500,-. Atas putusan ini para Tergugat yang terdiri dari Pemerintah, Total Indonesian Inc, PT.Imcor Nusantara dan PT. Santan Mas DRC menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan kasasi.

Mahkamah Agung dengan putusan tertanggal 17 Maret 1993 No.Reg.2727 K/Pdt/1991, yang hakimnya terdiri dari M.Yahya Harahap,SH; Kohar Hari Soemarno, SH, dan Yahya, SH menolak permohonan kasasi para Tergugat, karena dalam Pengadilan Tinggi Samarinda tidak ditemuinya penentangan-penentangan dengan hukum.dan/atau undang-undang.<sup>13</sup>

Dalam sistem Hukum Perdata Indonesia untuk menggugat ganti kerugian atau biaya pemulihan lingkungan terdapat dua jenis dasar hukum, yaitu :

- 
13. Sumber data Indonesian Center For Environmental Law (ICEL).

menterjemahkan *strict liability* dengan tanggung jawab seketika atau tanggung jawab secara ketat, penggunaan tanggung jawab seketika atau tanggung jawab ketat dimaksudkan untuk membedakannya dengan konsep *absolut liability* yang memiliki makna yang sedikit berbeda dengan *strict liability*. Namun mengapa kemudian pembuat UU memilih istilah tanggung jawab mutlak sebagai terjemahan dari *strict liability* tidak lain karena tanggung jawab mutlak merupakan istilah yang telah dikenal dan masyarakat di bandingkan dengan istilah tanggung jawab seketika atau tanggung jawab ketat.<sup>15</sup>

Kembali kepada doktrin pertanggung jawaban tradisional (*liability based on fault*), bahwa dengan menganalkan doktrin tersebut, maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan menghadapi berbagai kendala, karena doktrin ini tidak mampu mengantisipasi secara efektif dampak dari kegiatan industri modern yang mengandung resiko-resiko potensial. Hal ini disebabkan persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam unsur *negligence* atau *fault* adalah *the failure to exercise care of on ordinary prudent and careful man*.<sup>16</sup>

---

15. Mas Achmad Santosa dkk. Op.cit hal 13.

16. Richard A. Posner. 1990. *A Theory of Negligence*. Dalam *perspective on Tort Law* Robert L. Rabin. Boston : Little, Brown and Company. hal 14.

Dengan demikian apabila tergugat berhasil menunjukkan kehati-hatiannya, walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab.

Disamping itu doktrin pertanggungjawaban tradisional juga tidak mampu mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mengandung resiko penting atau besar (*significant risk*). Karena seringkali dalam gugatan pencemaran keterkaitan antara zat kimia yang dikeluarkan dan kerugian yang diderita penggugat menjadi perdebatan kontroversial. Perdebatan tersebut lebih disebabkan oleh keraguan terhadap sifat bahan atau zat kimia tertentu, apakah berbahaya atau tidak, sifat dari keluaran zat pencemar yang ditimbulkan atau apabila terdapat kemungkinan adanya penyebab ganda (*multiple causes*). Persoalan-persoalan dalam gugatan pencemaran seperti ini tentu saja menyulitkan pencari keadilan atau pihak-pihak yang benar-benar dirugikan dalam mengemukakan bukti-bukti tersebut.

Karena di Indonesia, pihak yang merasa dirugikan atau penggugat dalam kasus-kasus lingkungan biasanya memiliki latar belakang ekonomi lemah maupun pendidikan yang sangat rendah, sehingga sangatlah tidak adil apabila dibebani pembuktian tentang pencemaran dan keterkaitannya dengan kerugian yang mereka alami. Oleh karenanya mempertahankan doktrin pertanggungjawaban



tradisional untuk kasus-kasus yang memiliki resiko tinggi tidak akan mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam penegakan hukum lingkungan.

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka dikembangkanlah teori pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang bermula dari doktrin yang berasal dari kasus *Ryland v. Fletcher* di Inggris pada tahun 1868 sebagaimana disebutkan di atas. Menurut teori ini, apabila seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *ultrahazardous* atau *abnormally dangerous*, maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati (*almost care*) untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.

Asas tanggung jawab mutlak yang diatur dalam pasal 35 UU No.23 Tahun 1997 tersebut di atas dapat dijadikan landasan untuk melakukan tuntutan bagi pihak yang dirugikan sehingga mampu mengajukan kompensasi berupa ganti rugi maupun tindakan perbaikan lingkungan.

Dalam hal ini terdapat dua jenis kompensasi, yaitu kompensasi atas kerugian manusia atau kebendaan (*private compensation*) dan kompensasi yang diberikan kepada negara akibat lingkungan tercemar atau rusak

(biaya pemulihan lingkungan/*public compensation*).<sup>17</sup>

Dengan telah dirumuskannya asas tanggung jawab mutlak atau *strict liability* tersebut dalam Pasal 35 UU No.23 Tahun 1997, maka tidak terdapat alasan bagi hakim pengadilan untuk tidak menerapkannya.

Gugatan dan tuntutan hukum terhadap risiko lingkungan merupakan perwujudan dari aspek penerapan asas tanggung jawab mutlak dalam Hukum Lingkungan secara *legislative intent* berdasarkan *statutory mandate* melalui mekanisme Peradilan Umum.<sup>18</sup>

Dalam proses peradilan kasus gugatan dan tuntutan hukum atas terjadinya risiko lingkungan, ditentukan adanya pengkhususan untuk tidak dilakukan pembuktian terhadap unsur kesalahan pihak tergugat serta pemberlakuan mekanisme pembuktian terbalik dalam proses pengenyampingan pemenuhan kewajiban tanggung jawab, hal ini mencerminkan ditegakkannya aspek kepastian hukum, rasa keadilan, iklim demokratisasi, dan hak asasi manusia dalam proses peradilan Hukum Lingkungan.

Dalam kaitannya dengan kasus-kasus lingkungan di Pengadilan Negeri yang telah memperoleh putusan seba-

---

17. Mas Achmad Santosa. Opcit. hal 12.

18. Mas Achmad Santosa. 1994. Kasus-Kasus Lingkungan Yang Terjadi Di Indonesia. Proseding Seminar Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak Di Bidang Lingkungan Hidup. Jakarta 16 Juni 1994.

gaimana tersebut di atas, nampak bahwa penerapan asas tanggung jawab mutlak belum sepenuhnya diterapkan. Artinya putusan hakim masih berdasarkan pada ketentuan lex generalis (Pasal 1365 KUH Perdata), sehingga disini korban acapkali berada pada posisi yang lemah. Karena seperti diketahui bahwa dengan berpijak pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata korban (Penggugat) harus mampu membuktikan kesalahan Tergugat akibatnya gugatan pada kasus-kasus lingkungan hidup seringkali menemui 2 (dua) kemungkinan. Kemungkinan pertama gugatan ditolak. Kedua gugatan diterima tapi putusan (ganti kerugian yang diterima penggugat tidak sesuai dengan kerugian yang ditanggungnya). Sebagai contoh pada kasus PT. Sari Morawa dan PT.IIU. Gugatan Penggugat ditolak oleh hakim, padahal disini nampak jelas pada kasus tersebut protes masyarakat telah berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun, Pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup/Ketua Bapedal (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan), pada waktu itu Sarwono Kusumaatmadja telah memberikan "peringkat hitam" kepada PT. Sari Morawa karena yang dilakukannya sudah sedemikian parah.<sup>19</sup>

Dengan ditolaknya gugatan tersebut menunjukkan bahwa

---

19. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan/Environmental Impact Management Agency setiap tahunnya mengeluarkan daftar perusahaan yang baik maupun buruk, dalam pengelolaan lingkungan hidup.

hakim masih mendasarkan pada konsep hukum tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Pasal 1365 BW), artinya disini penggugat diharuskan membuktikan kesalahan tergugat yang notabene sulit bagi penggugat. Hakim disini tidak bersedia melihat hukum lingkungan secara luas, tetapi sebatas yang tertulis di dalam UU dan itupun dengan cara menafsirkannya secara sempit. Dari sejumlah kasus lingkungan yang memang belum banyak diajukan ke Pengadilan, kondisi atau putusan yang demikian cukup memberikan indikasi belum diterapkannya asas tanggung jawab mutlak tersebut dalam kasus lingkungan di Pengadilan Negeri.

Namun demikian pada kasus Muara Jawa Kalimantan putusan Mahkamah Agung tersebut seakan turut serta mengasah taring keadilan yang dapat menegakkan bulu roma para pencemar dan perusak lingkungan. Semoga putusan-putusan seperti ini dapat diikuti oleh hakim-hakim lainnya di Indonesia. Hikmah yang dapat diambil dari kasus ini adalah, bahwa dalam suatu usaha penegakan hukum lingkungan perlu dibekali tidak saja dengan keberanian untuk menegakkan keadilan tetapi juga keberanian untuk "mengadilkan penegakan", tanpa perlu merasa risi untuk menembus tembok yang membentang.

Oleh Daud Silalahi dikatakan bahwa kondisi peradilan hukum yang memungkinkan diwujudkannya efektivitas

hukum Lingkungan, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Para pihak yang berpotensi menjadi pelaku penyebab terjadinya risiko lingkungan akan berusaha memenuhi gugatan dan atau tuntutan hukum yang menyangkut terjadinya risiko lingkungan, karena dengan tidak mempermasalahkan aspek kesalahan dalam proses peradilan tersebut dimungkinkan keberadaan pihak tergugat tidak merasa disudutkan atau dinyatakan sebagai pihak yang telah *inrechtsmatigedaad*;
2. Pembuktian terhadap unsur kesalahan pihak tergugat oleh pihak penggugat merupakan suatu pekerjaan yang sukar untuk dilakukan, karena disamping besarnya biaya dan lamanya masa waktu yang dibutuhkan juga dapat menimbulkan polemik hukum dengan pihak tergugat yang akan menjadi lebih rumit dalam penyelesaiannya;
3. Mekanisme dalam proses peradilan hukum tersebut memberikan motivasi kepada para penanggung jawab aktivitas kegiatan dan atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting bagi kondisi lingkungan hidup, yang menggunakan dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk

---

20. M. Daud Silalahi. 1996. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Edisi Revisi. Bandung : Alumni. hal 35-36.

menyiapkan jaminan pemenuhan atas gugatan dan atau tuntutan hukum atas risiko lingkungan tersebut.

### C. FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN DIGUNAKAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM KASUS LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN NEGERI

Untuk menentukan apakah suatu kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan tersebut dapat dikenakan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), maka perlu dilihat bagaimana penentuan terhadap suatu kegiatan tersebut. Disamping itu terdapat pula persoalan mengenai jenis-jenis kegiatan yang dapat tunduk pada asas tanggung jawab mutlak.

Jika dilihat dari perkembangan penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) di negara-negara dengan tradisi *common law*, maka kriteria yang mula-mula ditentukan oleh hakim untuk menentukan apakah sebuah kegiatan dapat ditundukkan pada asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah apakah proses dan sifat kegiatan yang bersangkutan masih termasuk dalam batas-batas kelaziman atau telah berada di luar batas-batas kelaziman, sebagaimana diperlihatkan dalam kasus *Rylands v. Fletcher* yang melahirkan kriteria *non natural use*. Dengan demikian apakah sebuah kegiatan usaha dapat dikategorikan ke dalam kriteria "*non natural*" atau "tidak lazim" atau "tidak alami" akan sangat bergantung

pada perkembangan masyarakat pada umumnya.

Sebagai contoh adalah pada abad 18 di Inggris, memasukkan air dalam jumlah besar untuk mengisi waduk buatan sebagaimana diperlihatkan dalam kasus *Rylands v. Fletcher* telah dianggap dan dikategorikan sebagai "non natural". Akan tetapi untuk masa kini kegiatan seperti itu telah dianggap sebagai suatu yang biasa atau lazim dan bukan lagi merupakan hal yang luar biasa.

Selain kriteria yang bersumber dari putusan hakim dalam kasus *Rylands v. Fletcher*, *strict liability* dalam sistem hukum Amerika Serikat diberlakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sangat berbahaya (*abnormally dangerous activities*) Hukum Anglo Amerika yang berkembang melalui putusan-putusan pengadilan telah melahirkan kriteria-kriteria untuk menentukan apakah sebuah kegiatan termasuk ke dalam kategori kegiatan-kegiatan yang berbahaya (*abnormally dangerous activities*). Kriteria-kriteria tersebut kemudian dituangkan dalam *The Restatement of Torts* (pendapat para pakar hukum yang bersumberkan dari putusan-putusan pengadilan yang dijadikan acuan bagi keputusan pengadi-

lan) yaitu :<sup>22</sup>

1. Mengandung atau menimbulkan tingkat risiko berbahaya yang tinggi terhadap manusia, tanah atau harta benda bergerak (*existence of a high degree of some harm to the person, land or chattel of others*).
2. Kemungkinan terjadinya bahaya sangat besar (*likelihood that harm result from it will be great*).
3. Ketidakmampuan untuk meniadakan risiko dengan melakukan tindakan atau sikap hati-hati yang layak (*inability to eliminaste risk by the exercise of reasonable care*).
4. Kegiatan yang bersangkutan bukan merupakan hal atau kegiatan yang lazim (*extent to which the activity is not a matter of common usage*).
5. Ketidaksesuaian antara sifat kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan atau tempat di mana kegiatan itu diselenggarakan (*inappropriateness of the activity to the place where it is carried on*).
6. Manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat-sifat dari kegiatan itu (*extent to which its value to the community is outwheighed by its dangerous attributs*).

---

22. Mas Achmad Santosa Dkk. 1997. Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). hal 42.



Untuk menentukan secara konkrit apakah sebuah kegiatan termasuk dalam kategori kegiatan sangat berbahaya sehingga tunduk pada *strict liability* merupakan tugas pengadilan atau hakim. Para hakim dalam menangani perkara selalu berpedoman kepada putusan-putusan hakim terdahulu. Hal inilah yang kemudian oleh para sarjana disarikan menjadi kriteria-kriteria sebagaimana dituangkan dalam *The Restatement of Torts*.

Selanjutnya untuk menentukan apakah sebuah kegiatan tergolong ke dalam pengertian "abnormal" atau sangat berbahaya", semua kriteria harus dipertimbangkan karena kesemuanya sama penting. Meskipun demikian tidak setiap kriteria harus ada pada suatu kegiatan sehingga kemudian dapat diberlakukan *strict liability*. Yang terpenting adalah beberapa di antara enam kriteria tersebut sudah terpenuhi.

Indonesia sebagai pengikut tradisi *civil law* yang lebih menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum, maka keberadaan sebuah perangkat peraturan perundang-undangan yang memuat kriteria-kriteria dari kegiatan yang tergolong "sangat berbahaya" merupakan suatu kebutuhan. Penuangan atau perumusan ini perlu untuk memberikan semacam pedoman kepada para hakim yang memeriksa sebuah perkara agar dapat menentukan apakah terhadap kasus yang sedang

diperiksanya dapat diterapkan, asas tanggung jawab mutlak atau tidak. Dengan adanya kriteria-kriteria tersebut maka jenis-jenis kegiatan yang terjaring akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu pemikiran harus diadakan pada perumusan dan penciptaan kriteria-kriteria yang dapat ditentukan apakah sebuah kegiatan *individual in concreto* termasuk kegiatan yang sangat berbahaya. Setidaknya, keenam kriteria hasil perkembangan hukum Anglo Amerika dapat diserap atau diadopsi.

Bagaimanapun juga harus diakui bahwa penerimaan asas tanggung jawab mutlak dalam hukum positif Indonesia dipengaruhi oleh keberadaan *strict liability* dalam hukum Anglo Amerika selain oleh konvensi-konvensi Internasional.

Mengingat unsur normatif hukum lingkungan banyak diserap dari berbagai sumber hukum luar, sehingga penerapan maupun pelaksanaan hukumnya harus memperhatikan *ultimate rules of recognition* dari kehidupan masyarakat subjek hukumnya.<sup>23</sup>

Adapun jenis-jenis kegiatan yang tunduk pada asas

23. Teguh Sudarsono. 1999. Mekanisme Jasa Asuransi Sebagai Sarana Penunjang Penerapan Aspek Hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability Principle) Dalam Hukum Lingkungan. Disertasi Pascasarjana Universitas Indonesia.

tanggung jawab mulak menurut hukum Anglo Amerika adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Kegiatan usaha penghasil, pengolahan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
2. Penyimpanan gas yang mudah terbakar dalam jumlah besar di kawasan perkotaan;
3. Instalasi nuklir;
4. Pengeboran minyak;
5. Penggunaan mesin pematok tiang besar (pile driving) yang menimbulkan getaran luar biasa; dan
6. Limpahan air.

Kemudian menurut Hukum Belanda, kegiatan-kegiatan yang tunduk pada asas tanggung jawab mulak meliputi :

1. Kegiatan pengolahan bahan berbahaya;
2. Kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya;
3. Kegiatan pengangkutan bahan berbahaya melalui laut, sungai-sungai dan darat;
4. Kegiatan pengeboran dan tanah yang menimbulkan ledakan.

Sedangkan *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC)* menyebutkan kegiatan yang khususnya tunduk pada asas tanggung jawab mutlak adalah pengangkutan minyak melalui laut yang menimbulkan

---

24. Mas Achmad Santosa. Ibid hal 43.

kan pencemaran.

Dalam hal ini M. Daud Silalahi mengatakan bahwa asas tanggung jawab mutlak dapat diterapkan secara bertahap dan selektif pada berbagai aktivitas kegiatan usaha yang potensial menimbulkan risiko lingkungan, dengan pertimbangan sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Tingkat risiko dihadapkan pada kemampuan teknologi yang ada;
2. Tingkat bahaya dihadapkan pada faktor kesulitan dalam pencegahan maupun penanggulangannya;
3. Tingkat kemampuan pencegahan dihadapkan pada berbagai akibat atau bahaya yang ditimbulkan dalam aktivitas kegiatannya;
4. Tingkat kelayakan diperbandingkan antara manfaat dan risiko lingkungan yang akan diterima;
5. Kelaziman aktivitas dari jenis kegiatan yang bersangkutan antara lain ditentukan sebagai berikut :
  - (1) Risiko tidak menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia, hewan, dan atau tumbuh-tumbuhan, dan atau kelangsungan kondisi tanah, hak-hak kebenaran, dan lain sebagainya;
  - (2) Bahaya yang ditimbulkan tidak mempunyai bobot

---

25. M. Daud Silalahi, dalam buku Koesnadi Hardjasoemantri. 1996. Hukum Tata Lingkungan, Edisi Keenam. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. hal 386-387.

yang besar;

(3) Bahaya dan atau risiko yang ditimbulkan diperkirakan tidak sulit untuk ditanggulangi dengan upaya biasa;

6. Aktivitas kegiatannya merupakan aktivitas yang biasa dilakukan;
7. Kegiatannya tepat untuk dilakukan di tempat tersebut dan atau tidak memerlukan lokasi khusus, dan atau
8. Kegiatannya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat disekitarnya.

Jika melihat UU No.23 Tahun 1997, maka kriteria mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan dan jenis yang dapat ditundukkan dalam tanggung jawab mutlak adalah :

1. Usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan;
2. Usaha dan kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan
3. Usaha dan kegiatan yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun.

Dari ketiga kriteria di atas maka UU No.23 Tahun 1997 menganut gabungan antara kriteria "akibat" dan "kegiatan". Melihat kriteria ini maka disamping hakim pengadilan harus memahami berbagai ketentuan internasional dan nasional tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) atau *toxic substance*, limbah B-3 (*hazardous*

waste), juga dituntut proaktivisme (kemampuan menggali dan menemukan hukum) sesuai dengan perkembangan teknologi dan keabsahan pelestarian daya dukung lingkungan yang tentu bersifat dinamis.

#### D. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM KASUS LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN NEGERI

*Strict liability* merupakan salah satu bagian dari penegakan hukum lingkungan, dalam konteks penegakan hukum lingkungan tersebut *strict liability* merupakan instrument hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Namun demikian asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus lingkungan hidup tentunya menghadapi hambatan-hambatan dalam penerapannya.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>26</sup>

Oleh Muladi penegakan hukum diartikan dalam kerangka tiga konsep yakni penegakan hukum yang bersifat total

---

26. Satjipto Rahardjo. 1983. Permasalahan Hukum di Indonesia. Bandung : Alumni. hal 15.

(*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*), yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat. 27

Selanjutnya harus diingat pula bahwa penegakan hukum akan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :28

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum tersebut;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penega-

---

27. Muladi. 1997. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU. No.23 Tahun 1997. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Hukum Lingkungan. Diselenggarakan Oleh fakultas Hukum UNDIP Semarang. Semarang, 21 Pebruari 1998. hal 30.

28. Soejono Soekanto. 1983. Penegakan Hukum. Bandung : Bina Cipta. hal 5.

kan hukum;

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kemudian oleh Harun M. Husein dikatakan bahwa faktor pendukung dan kendala penegakan hukum lingkungan berkisar pada faktor-faktor : sarana hukum, penegak hukum, fasilitas dan sarana dan faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. 29

Berpijak pada pendapat-pendapat tersebut diatas maka pada hakekatnya dalam penerapan *strict liability* setidaknya menghadapi berbagai hambatan , yang terkait pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut .

Dari satu kasus yang cukup populer di Indonesia yaitu kasus Masyarakat vs. PT. Sari Morawa (1997), akan dapat diketahui bagaimana hambatan atau kendala-kendala pada penerapan asas tanggung jawab mutlak sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan. Kasus tersebut merupakan pencemaran yang dilakukan oleh PT. Sari Morawa terhadap Sungai Belumai di Medan, Sumatera

29. Harun M.Husein. 1992. Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya. Jakarta : Bumi Aksara . hal 209.



Utara. Hakim dalam kasus tersebut memutuskan bahwa PT. Sari Morawa tidak bersalah dengan menyatakan bahwa bukti yang diajukan tidak memadai. Padahal, disamping protes masyarakat yang telah berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun, Pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup/Ketua Bapedal (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan), waktu itu Sarwono Kusumaatmaja telah memberikan peringkat hitam kepada PT. Sari Morawa karena yang dilakukannya sudah sedemikian parah.<sup>30</sup> Di tambah dengan bukti-bukti dari Bapedal yang diberikan kepada hakim yang menguatkan tindakan pencemaran yang dilakukan oleh PT Sari Morawa terhadap Sungai Belumai. Dengan demikian adalah sangat beralasan muncul anggapan berbagai kalangan bahwa putusan pengadilan perdata maupun pidana dalam kasus-kasus lingkungan tercatat sebagai putusan yang menimbulkan kekecewaan bagi para pencari keadilan di Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hambatan dalam penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan keperdataan selama ini disebabkan antara lain oleh :

---

30. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan/*Environmental Impact Management Agency* setiap tahunnya mengeluarkan daftar perusahaan yang baik maupun buruk, dalam pengelolaan lingkungan hidup. Buletin Informasi Hukum Dan Advokasi Lingkungan No.01 Tahun V April 1999. hal 3.

Pertama, Sarana Hukumnya. UU No.4 Tahun 1982 (UULH), belum memiliki peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menjabarkan beberapa pasal bahkan sampai dicabutnya UU tersebut dengan UU No.23 Tahun 1997 (UUPLH) diundangkan, misalnya dalam bidang perdata, yang menyangkut tuntutan ganti rugi dan biaya pemulihan, dan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang masih memerlukan pengaturan segi prosedurnya maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya lebih lanjut. Walaupun demikian dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan suatu hasil bahwa sanksi perdata berupa ganti kerugian masih dipandang perlu untuk dipertahankan dalam penegakan norma-norma hukum lingkungan. Walaupun dalam kenyataannya sanksi perdata yang berupa ganti kerugian sulit untuk dilaksanakan karena dalam proses beracara secara perdata akan memakan waktu yang lama dan tenaga serta biaya yang tidak sedikit, ditambah dengan proses pembuktian yang sulit. Lamanya proses dan beban pembuktian yang sulit ini akan menghambat penegakan hukum lingkungan.

Kedua, Sumber Daya Manusianya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hanya sedikit hakim yang pernah menangani kasus lingkungan hidup <sup>31</sup>. Kondisi yang demikian

---

31. Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri Semarang.

ini dikarenakan memang masalah lingkungan merupakan masalah yang baru disamping itu penanganan kasus lingkungan memerlukan kecermatan penyidikan dari bawah serta harus didukung oleh bukti yang cukup kuat, karena apabila tidak didukung oleh bukti yang cukup kuat maka perkara itu akan mentah di depan pengadilan dan hal yang demikian ini akan merendahkan martabat lembaga pengadilan. Keadaan yang demikian ini adalah merupakan konsekuensi dari sistem peradilan di negara kita baik dalam hal gugatan perdata dimana penggugat harus dapat membuktikan alasan gugatannya maupun dalam hal perkara pidana dimana jaksa harus juga dapat membuktikan kesalahan terdakwa untuk dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah dilakukannya. Keterbatasan aparat hakim sebagai penegak hukum yang cukup memahami serta berkemampuan secara teknis profesional dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Misalnya dalam sistem pembuktian dan pertanggungjawaban keperdataan (*strict liability*), ataupun prosedur tuntutan ganti rugi dan lain-lain, kesemuanya itu membutuhkan pemikiran-pemikiran yang inovatif dari para hakim manakala menangani kasus perdata lingkungan hidup. Kemampuan untuk ini harus didasari oleh pengetahuan yang cukup tentang hukum lingkungan, hal mana tentunya membutuhkan pendalaman melalui sarana pendidikan maupun pelatihan-pelatihan

serta studi komparatif. Ini disebabkan karena penanganan kasus lingkungan hidup membutuhkan pendekatan interdisipliner yang saling terkait, kompleks dan bukan saja pendekatan yuridis secara kaku dan konvensional, melainkan juga pendekatan ekologis. Seperti yang terjadi dalam kasus Masyarakat vs Sari Morawa dan Kasus PT.IIU, hakim tidak bersedia melihat hukum lingkungan secara luas, tetapi sebatas yang tertulis di dalam UU dan itupun dengan cara menafsirkan secara sangat sempit. Disamping itu masih sedikit ahli yang memang benar-benar mengetahui masalah lingkungan hidup baik secara yuridis maupun teknis.

Ketiga, Sarana Peralatan Teknis. Peralatan teknis yang menunjang tugas-tugas penegakan hukum masih kurang, misalnya antara lain laboratorium yang dapat menjadi acuan tunggal dalam soal pembuktian adanya pencemaran dan sebagainya.

Dalam hal ini Heryanto.<sup>32</sup> menyebutkan bahwa pemerintah selalu ragu-ragu untuk melakukan penegakan hukum karena :

1. industri pencemar tidak jarang mengancam untuk menutup pabrik, yang akan berdampak pada masalah

---

32. Stefanus Heryanto. 1996. Suatu Gagasan Bagi Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia; pendekatan Ekonomi Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan. Jurnal Hukum Lingkungan. ICEL. Tahun III No.1 Tahun 1996.

pengangguran tenaga kerja, dan

2. industri pencemar biasanya menyumbangkan penghasilan yang cukup besar kepada pemerintah, baik melalui pajak maupun devisa. Dengan keputusan menutup suatu industri maka dikhawatirkan pendapatan negara akan berkurang. Dengan demikian, maka para pencemar memiliki posisi berunding (*bargaining power*) yang kuat.

*Strict liability* hanyalah satu aspek yang perlu dikembangkan dalam kerangka *civil liability* sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan keperdataan (*civil environmental enforcement*). Apabila *strict liability* telah diakui dalam sistem hukum kita, *public interest lawyers* dan para hakim telah memahami konsep ini, beban pembuktian terbalik andaikataupun juga diakui, masih banyak permasalahan-permasalahan berat dalam konteks *civil liability* ini yang perlu secara bersamaan dikembangkan. Pengembangan teori untuk menetapkan ganti kerugian (ganti kerugian terhadap kerugian yang seketika (*immediate*) maupun bersifat (*future loss*), alokasi pembebanan pertanggungjawaban apabila pihak yang bertanggung jawab tidak mampu membayar kerugian, antisipasi apabila sulit untuk mencari pihak yang bertanggung jawab (*unidentifiable liable parties*) dan lain sebagainya. Oleh karena *civil liability* seringkali bersifat

sangat kompleks maka mekanisme alternatif perlu dikembangkan seperti pendanaan lingkungan (*environmental dedicated fund*), dan penyelesaian tanggung jawab keperdataan melalui *alternative dispute resolution (ADR)* di luar pengadilan.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. KESIMPULAN

1. Permasalahan lingkungan hidup sering muncul seiring dengan meningkatnya sektor non migas, hal ini disebabkan karena sektor ini cenderung lebih meningkatkan penggunaan sumber daya alam seperti bahan tambang atau mineral serta flora dan fauna yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup. Data penting lainnya menunjukkan bahwa sektor industri pada tahun 2010 juga akan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan. Selanjutnya kasus lingkungan hidup dengan media air mendominasi kasus-kasus lingkungan hidup di Indonesia. Adapun upaya penyelesaian terhadap kasus lingkungan hidup tersebut adalah dengan penyelesaian administratif kemudian *Alternatif Dispute Resolution* (penyelesaian di luar pengadilan), terakhir pidana dan perdata. Namun demikian dari sejumlah kasus-kasus lingkungan yang ada menunjukkan masih banyak kasus-kasus lingkungan yang belum jelas bagaimana penyelesaiannya.
2. Penerapan asas tanggung jawab mutlak Di Pengadilan Negeri masih didasarkan pada ketentuan normatif

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya hakim dalam memeriksa gugatan ganti rugi dalam kasus-kasus lingkungan masih berpijak pada ketentuan pasal 1365 BW perihal perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan demikian penggugat seringkali ada dalam posisi lemah karena disini unsur kesalahan memainkan peranan yang penting dalam menentukan bertanggung jawab atau tidaknya seseorang. Suatu gugatan ganti kerugian dalam hukum lingkungan yang berdasarkan asas kesalahan baru dapat dikabulkan apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan tergugat memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

- a. Adanya kewajiban untuk melaksanakan tingkat kehati-hatian, dimana seseorang lain di dalam kondisi yang serupa akan melaksanakan kehati-hatian itu secara layak dan bijaksana;
- b. adanya pelanggaran kewajiban karena kegagalan untuk mengikuti standar perbuatan yang layak;
- c. bahwa perbuatan yang tidak layak tersebut merupakan penyebab yang aktual dan terdekat dari kerugian yang diderita oleh penggugat, dan
- d. adanya kerugian nyata pada pihak penggugat.

Kondisi demikian jelas akan memberatkan bagi para korban. Mereka akan memiliki beban yang berat untuk membuktikan bahwa pihak tergugat telah memenuhi



unsur -unsur kesalahan tersebut.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan digunakannya asas tanggung jawab mutlak dalam kasus lingkungan hidup di Pengadilan Negeri maka hakim harus dapat menemukan kriteria untuk menentukan apakah sebuah kegiatan dapat ditundukkan pada asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yakni dengan melihat proses dan sifat dari kegiatan yang bersangkutan apakah masih termasuk dalam batas-batas kelaziman atau telah berada di luar batas-batas kelaziman. Untuk menentukan apakah sebuah kegiatan usaha dapat dikategorikan ke dalam kriteria lazim atau tidak lazim akan sangat bergantung pada perkembangan ilmu dan teknologi atau perkembangan masyarakat pada umumnya. Maka disini hakim pengadilan harus dapat melakukan penemuan hukum atau penggalian kriteria baru dalam rangka penerapan asas tanggung jawab mutlak tersebut.
4. Penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu bagian dari konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam penerapannya tentu menghadapi hambatan-hambatan. Hambatan dalam penerapannya tersebut lebih disebabkan karena :

a. sarana hukumnya

sampai dengan digantikannya UU No.4 Tahun 1982 (UULH) dengan UU No.23 Tahun 1997 (UUPLH) belum terdapat peraturan pelaksana khususnya yang mengatur segi-segi prosedur pelaksanaan asas tanggung jawab mutlak dan peraturan-peraturan pelaksanaan lebih lanjut .

b. sumber daya manusianya

hakim kurang melihat hukum lingkungan secara luas, tetapi sebatas yang tertulis di dalam UU dan itupun dengan cara menafsirkannya secara sempit.

c. sarana peralatan teknis

kurangnya sarana-sarana teknis yang menunjang tugas-tugas penegakan hukum misalnya laboratorium sebagai sarana penunjang dalam soal pembuktian adanya pencemaran dan sebagainya.

B. SARAN

1. Di masa yang akan datang dari berbagai aspek pembangunan dapat terjadi peningkatan kasus, sengketa dan permasalahan yang banyak menimbulkan risiko lingkungan. Guna mengantisipasinya, perlu dilakukan berbagai upaya antara lain dengan mengoptimalisasi dan mendinamisasikan penerapan asas tanggung jawab mutlak dalam aktivitas penataan hukum dan pengelo-

laan lingkungan hidup.

2. Hakim harus berani i sacara lebih profesional mendalami berbagai aspek yang melatarbelakangi kasus-kasus lingkungan hidup. Sehingga Pengadilan dalam fungsinya sebagai suatu lembaga *judicial control*, mampu secara positif menunjang kebijakan kelestarian lingkungan hidup yang sudah menjadi isu nasional dan internasional.

Hakim harus dapat menerapkan asas tanggung jawab mutlak tersebut yang diterapkan secara *lex specialis*, dengan spesialisasi :

- Tidak mendasarkan aspek pembuktian unsur kesalahan pihak tergugat;
  - dilakukannya proses pembuktian terbalik;
  - ganti rugi diwujudkan dalam bentuk kompensasi (*private/public compensation*)
  - diterapkan tidak bersifat absolut karena dapat dikesampingkan dengan pemenuhan aspek tertentu.
- Jadi meskipun pemenuhan beban kewajiban atas risiko lingkungan ditentukan secara mutlak, langsung dan seketika, namun dalam ketentuntuan hukumnya disertakan aspek pengenyampingan hukum yang didasarkan atas berbagai pertimbangan tertentu (Pasal 35 ayat 2 UU No.23 Tahun 1997 ).

3. Untuk menentukan kriteria-kriteria dapat digunakannya asas tanggung jawab mutlak pada kasus lingkungan hidup di Pengadilan Negeri, maka *The Restatement of Torts*( pendapat pakar hukum yang bersumber dari putusan-putusan pengadilan) dapat dijadikan acuan bagi keputusan pengadilan di Indonesia.
4. Apabila diharapkan adanya penegakan hukum bagi kasus-kasus lingkungan yang dilakukan oleh badan-badan peradilan (hakim), maka beberapa hambatan yang timbul harus diatasi melalui :
  - a. penerbitan peraturan pelaksanaan dari UU No.23 Tahun 1997.
  - b. pendidikan dan pelatihan bagi hakim.
  - c. kelengkapan sarana teknis guna menunjang soal pembuktian adanya pencemaran dan sebagainya.
5. Asas tanggung jawab mutlak sebagai bagian dari pene-gakan hukum lingkungan keperdataan, maka masih banyak permasalahan-permasalahan berat yang perlu secara bersamaan dikembangkan seperti pengembangan teori untuk menetapkan ganti kerugian, alokasi pembe-banan pertanggungjawaban apabila pihak yang bertanggungjawab tidak mampu membayar kerugian, antisipasi apabila sulit untuk mencari pihak yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Oleh karena itu berbagai alternatif perlu dikembangkan seperti pendanaan

lingkungan, dan juga penyelesaian tanggung jawab  
keperdataan melalui *Alternative Dispute Resolution*  
(ADR) di luar pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Tresnasastrawidjaja. Pencemaran Lingkungan. Cet.I. Bandung : Rineka Cipta. 1991.
- Abdurrahman. Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Indonesia. Bandung : Alumni . 1980.
- . Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung : Alumni. 1983.
- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan. Cet I. Bandung : Alumni. 1982.
- Amsyari, Fuad. Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1981.
- Danusaputro, St.Munadjat. Hukum Lingkungan Buku I Umum. Bandung : Bunacipta. 1991.
- .Hukum Lingkungan Buku IV Global. Bandung : Binacipta. 1979.
- Darmaputera, Eka. "Prediksi dan Proyeksi Isu-isu Teologis Dasawarsa Sembilanpuluhan" dalam Fundamentalisme Agama-Agama dan Teknologi. Jakarta : BPK.Gunung Mulia. 1992.
- Dirdjosisworo, Sudjono. Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri. Cet.V. Bandung : Alumni. 1983.
- Djojohadikusumo, Soemitro. Pembangunan Ekonomi Indonesia. Cet II. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1987.
- Fuad, Amsyari. Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan. Cet. I. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1977.
- Hadiati Koeswadji, Hermien. Hukum Pidana Lingkungan. Bandung : Aditya Bakti. 1993.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta : Gajah Mada University. 1994.
- . Aspek Hukum Peran Serta Masya-

- ta : Gajah Mada University Press. 1990.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Perlindungan Lingkungan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1991.
- . Menjelang 10 Tahun UULH. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1992.
- Husein M.Harun. Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya. Jakarta : Bumi Aksara. 1993.
- . Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Cet.I. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hadiati Koeswadji, Hermin. Hukum Pidana Lingkungan. Cet.I. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1993.
- Katili. Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Nasional. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1983.
- Kartaatmadja, Komar. Gantirugi Internasional pencemaran Minyak di Laut. Bandung : Alumni. 1981.
- Lummert, Rudiger. "Changes in Civil Liability Concept" dalam IUCN. Trend in Environmental Policy and Law. Berlin : Erich Schmidt Verlag. 1980.
- Linden, Allen M. Strict Liability, Nuisance and Legislative Authorization. 1965.
- Lotulung, Paulus Efendi. Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata Cet.I. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1993.
- Martopo, Sugeng. Kebijaksanaan Nasional Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Yogyakarta : Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. 1991.
- Marstrand, Paulina K.T. Craig Sinclair. Allan D. McKnight. Environmental Pollution Control. Technical, Economic and Legal Aspects. London : George Allen and Uwin Ltd. 1974.
- R.E. Suriatmadja. Ilmu Lingkungan. Bandung : ITB. 1979.
- Rangkuti, Siti Sundari. Sanksi Pidana Dalam Hukum Lingkungan. Surabaya : Penerbit Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 1984.
- . Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. Surabaya : Unair. 1987.

- Rahardjo, Satjipto. Hukum Dan Perubahan Sosial. Bandung : Alumni. 1983.
- . Hukum Dan Masyarakat. Cet.IV. Bandung : Angkasa. 1986.
- . Masalah Penegakan Hukum. Cet II. Bandung : Alumni. 1988.
- Rasjidi, Lili dan IB Wiyasa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Cet.II. Bandung : Remadja Rosda Karya. 1993.
- Ryadi, Slamet. Pencemaran Air. Cet.I. Surabaya : Karya Anda. 1984.
- R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT. Sinar Grafika. 1993.
- Sumber Daya Alam. Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Indonesian Center for Environmental Law.
- Suparni, Ninik. Pelestarian Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta : Sinar Grafika. 1994.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum Cet.III. Jakarta : UI Press.1986.
- . Perihal Kaedah Hukum. Cet.IV. Bandung : Alumni. 1986.
- . Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1985.
- . Sosiologi Suatu Pengantar. Cet.VIII. Jakarta : Rajawali Press.
- . Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Rajawali . 1990.
- Salim, Emil. Tantangan Masa Depan. Lokakarya III BAPPEDA BKLH,PSL,PSK Seluruh Indonesia. Jakarta : LPES. Oktober 1985.
- . Lingkungan Hidup Dan Pembangunan. Cet VII. Jakarta : Mutiara Sumber Widya. 1990.
- . Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Cet.VI. Jakarta : LP3ES. 1993.
- Saragih, JPN. Bunga Rampai Lingkungan Hidup. Surabaya : Ghalia Indonesia. 1976.
- Siahaan, NHT. Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingku-



- ngan. Jakarta : Erlangga. 1986.
- Soedjono D. Upaya Teknologi dan Penegakan Hukum Menghadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Industri. Bandung : Citra Aditya Bhakti. 1991.
- Soemarwoto, Otto. Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global. Bandung : Binacipta. 1991.
- . Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta : Djambatan. 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Dan Juri-metri. Semarang : Yudistira. 1988.
- Salindeho, John. Undang-Undang Gangguan Dan Masalah Ling-kungan. Jakarta : Sinar Grafika. 1989.
- Silalahi, Daud. Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia). Bandung : Citra Aditya Bakti. 1992.
- Silalahi, Daud. Amdal Dalam Sistem hukum Lingkungan Di Indonesia. Cet.I. Bandung : Mandar Maju.
- Supardi. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Bandung : Alumni. 1994.
- Surjani, Moh.Rafiq Ahmad Rozy Munir. Lingkungan Sumber daya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan . Jakarta : UI Press. 1987.
- Subagyo, P.Joko. Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggula-ngannya . Cet.I. Jakarta : Rineka Cipta. 1992.
- Sumaatmadja, Nursid. Studi Lingkungan Hidup. Cet.I. Ban-dung : Alumni. 1989.
- Sembiring, Sulaiman N. Hukum Dan Advokasi Lingkungan. Jakarta : ICEL. 1998.
- Nur'dua.M.Arief dan Nursyam B. Sudharsono. Hukum Lingku-ngan Perundang-undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1993.
- Tobing, Ml. Ikhtisar Hukum Lingkungan Hidup. Jakarta : Erlangga. 1983.
- Usman, Rachmadi. Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Nasional. Cet.I. Jakarta : Akadènika Presindo. 1993.
- Wilardjo, Liek. Realita dan Desiderata. Yogyakarta : Duta

Wacana University Press. 1990.

Wilson, Edward O. Consilience The Unity of Knowledge  
Environmental Policy, Ethics, Social Science,  
Biology. New York : Alfreda A.Knopp. 1998.

Wasis. Pengantar Ekonomi Perusahaan. Cet.V. Bandung :  
Alumni.1992.

Zen, MT. Menuju Kelestarian Lingkungan. Jakarta : Gramedia. 1984.

#### Majalah/Makalah/Artikel

A.Sumardja, Effendy. Peranan Bappedal Dalam Menyelesaikan  
Sengketa Lingkungan. Makalah pada Seminar Nasional  
Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Diselenggarakan  
oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas  
Semarang Dalam rangka Dies Natalis XII Universitas  
Semarang. Semarang, 4 September 1999.

Buletin Informasi Hukum Dan Advokasi Lingkungan. No.06  
Tahun 1997.

-----. No.07  
Tahun 1997.

-----. No.09  
Tahun 1997.

-----. No.01  
Tahun V April 1999.

Departemen Pertahanan Keamanan RI. Pengetahuan Dasar  
Tentang Masalah Lingkungan Hidup. Makalah. Jakarta,  
Otober 1996.

GN, Abdul Hakim. "Sengketa Lingkungan dan Masalah Beban  
Pembuktian". Makalah dalam Diskusi Dua Hari Masa-  
lah-masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa  
Lingkungan. Jakarta 19-20 Juni 1989.

Gunawan, Eddy. Persepsi Perusahaan Terhadap Masalah Ling-  
kungan. Makalah pada Seminar Nasional Penyelesaian  
Sengketa Lingkungan. Diselenggarakan oleh Pusat  
Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Semarang.  
Semarang, 4 September 1999.

Hardiyanto, Andil. Kendala Penyelesaian sengketa Lingkun-  
gan Di Luar Pengadilan. Makalah pada Seminar Na-  
sional Penyelesaian sengketa Lingkungan. Diseleng-  
garakan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup  
Universitas Semarang. Semarang 4 September 1999.

- Indonesian Center for Environmental Law. Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam. Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta : ICEL. 1999.
- Jurnal Hukum Lingkungan. Tahun IV No.1 September 1997.
- Tahun V No.1 Agustus 1999.
- Jurnal Lingkungan (Environmental Journal. Nolume I Nomor 3 Januari 1998.
- Kusumaatmaja, Sarwono. Masalah Lingkungan Sebagai Issue Global. Makalah pada Seminar Nasional Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Semarang. Semarang, 4 September 1999.
- Lotulung, Paulus Effendi. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam UU No.23 Tahun 1997 Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. Disampaikan pada Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 21 Pebruari 1998.
- Mandiri Handjon, Philipus. UU No.23 Tahun 1997 Dan Penegakan hukumnya Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi. Makalah pada Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diselenggarakan oleh fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 21 Pebruari 1998.
- Muladi. Prinsip=Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya dengan UU No.23 Tahun 1997. Makalah pada Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum universitas Diponegoro Semarang. semarang, 21 Pebruari 1998.
- Rangkuti, Siti Sundari. "Tanggung Gugat Pencemar dan Beban Pembuktian dalam Kasus Pencemaran Lingkungan". Makalah dalam Diskusi Dua Hari Masalah-masalah Prosedural Dalam Penyelesaian sengketa Lingkungan. Jakarta 19-20 Juni 1989.
- Suara Merdeka. 9 Oktober 1999.
- Santosa, Mas Achmad. UU. No.23 Tahun 1997 Ditinjau Dari Aspek Feasibilitas Penerapan Alternative Dispute Resolution. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi Undang-Undang No.23

Tahu 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 21 Pebruari 1998.

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Penanganan Kasus Pencemaran Dan Pengelolaan Lingkungan Di Dukuh Tapak Kotamadya Dati II Semarang. Laporan. Semarang 1996.

P. Hadi Sudharto. Amdal dan Audit Lingkungan Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997. Makalah pada Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diselenggarakan oleh Fakultas hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 21 Pebruari 1998.

Patrik, Purwahid. Norma-Norma Lingkungan. Makalah dalam Kursus Daar-Dasar Analisis Dampak Lingkungan Angkatan V di Universitas Diponegoro. Kerjasama Kantor Menteri Negara KLH-Puslit KLH Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang.

-----. Dasar Pengetahuan Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan Lingkungan Hidup. Makalah pada Kursus Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Tipe A). Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang. Semarang, 1-3 Agustus 1994.

-----. Perkembangan Tanggung Gugat Risiko dalam Perbuatan Melawan Hukum. Pidato Pengukuhan pada persmian penerimaan jabatan Guru Besar tetap Pada Fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang. semarang, 5 Mei 1990.

Soedarsono, Teguh. Mekanisme Jasa Asuransi Sebagai Sarana Penunjang Penerapan Aspek Hukum Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability Principle) Dalam Hukum Lingkungan. Ringkasan Disertasi diajukan untuk meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dihadapan Dewan Senat Guru Besar Universitas Indonesia Jakarta. Jakarta, 27 Maret 1999.

-----. Mekanisme Asuransi sebagai Sarana Penunjang Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penataan hukum Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Makalah untuk materi bahan ajaran hukum Lingkungan bagi Mahasiswa Program Pascasarjana Studi ilmu Hukum. Jakarta 1999.

Peraturan Perundangan  
Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Ling-  
kungan Hidup.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-  
43/MENLH/10/1998 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan  
Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan  
C Jenis Lepas di Daratan.

Himpunan Peraturan Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan.  
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 1999.

UPT-PUSTAK-UNDIP

UPT-PUSTAK-UNDIP